



**LAPORAN KINERJA
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2023**



**PEMERINTAHAN KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Jln. Dipokusumo No. 7 Purbalingga Tlp. (0281) 896411
PURBALINGGA 53311
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Alloh SWT, yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 dapat diselesaikan dan kami susun dengan baik, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2023, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan dan capaian program dan kegiatan guna mewujudkan sasaran-sasaran yang telah ditargetkan dapat dicapai pada tahun 2023. Dengan adanya laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara detail, transparan, obyektif dan terukur mengenai laporan kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga, sekaligus sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan ditahun mendatang

Semoga Laporan Kinerja tahun 2023 ini akan memberi arti bagi para penggunanya dan menjadi media dalam menginformasikan pesan-pesan yang dapat diberikan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga dalam mewujudkan Perpustakaan dan Kearsipan yang berkualitas baik serta dapat memberikan kontribusi pada kecerdasan masyarakat dan tertib arsip

Purbalingga, Februari 2024

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN PURBALINGGA



SADONO. S. Sos. M. Si
Pembina Utama Muda

NIP. 19731108 199303 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Gambar.....	iv
Daftar Tabel.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	2
A...Latar Belakang.....	2
B. Landasan Hukum	4
C.. Maksud dan Tujuan.....	4
D.. Gambaran Umum Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	5
E.. Fungsi Strategis dan Permasalahan Utama.....	11
F...Sistematika.....	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUS- TAKAAN KABUPATEN PURBALINGGA	15
A. Perencanaan Strategis.....	15
1. Rencana Strategis (RENSTRA).....	16
2. Tujuan	20
3. Sasaran Strategis	20
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	30
A. Capaian Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.....	30
1. Pengukuran Kinerja.....	30
2...Capaian Kinerja Indikator Utama dan Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	31
B.....Realisasi Anggaran.....	56
BAB IV PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B.....Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang.....	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar. 1.1. Struktur Organisasi Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga.

DAFTAR GRAFIK

1. Grafik 3.1. Skor Nilai IPLM

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1. Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin
2. Tabel. 1.2. Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan
3. Tabel. 1.3. Data Pegawai berdasarkan pangkat dan golongan
4. Tabel. 1.4. Data Pegawai Menurut Status Kepegawaian
5. Tabel. 1.5. Data Komposisi SDM Berdasarkan Fungsi
6. Tabel. 1.6. Data Sarana Prasarana dan Peralatan
7. Tabel. 1.7. Koleksi Bahan Pustaka Tahun 2023
8. Tabel. 1.8. Daftar Khasanah Arsip s.d 2023
9. Tabel. 2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
10. Tabel. 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja
11. Tabel. 3.2 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Pada Setiap Indikator Tujuan dan Sasaran Tahun 2022
12. Tabel. 3.3 Rekapitulasi Hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal Tahun 2023
13. Tabel 3.4 Hasil Monitoring Pengawasan Kearsipan Internal Pemerintah Kabupaten Purbalingga
14. Tabel 3.5 Pengukuran Capaian Kinerja Tujuan Dinarpus Kabupaten Purbalingga Tahun 2023
15. Tabel. 3.6 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tujuan Dinarpus
16. Tabel. 3.7 Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2022 dan Tahun 2023 Target RPJMD
17. Tabel.3.8 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kuantitas Pengelolaan Kearsipan Secara Baku
18. Tabel.3.9 Perbandingan Analisis antara Target dan Realisasi Tahun 2023 dengan Indikator Persentase Kenaikan OPD yang Mengelola Arsip Secara Baku
19. Tabel.3.10 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2022 dan Tahun 2023 Target Kinerja Akhir RPJMD
20. Tabel. 3.11 Komponen Penilaian SAKIP
21. Tabel. 3.12 Capaian Sasaran Meningkatkan Implementasi SAKIP Dinarpus
22. Tabel. 3.13 Matrik Tindak Lanjut SAKIP Tahun 2023

23. Tabel. 3.14 Analisis Capaian Kinerja Sasaran dengan Indikator Nilai SAKIP
24. Tabel. 3.15 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2022 dan Tahun 2023 Target Kinerja Akhir RPJMD
25. Tabel. 3.16 Capaian Kinerja Indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
26. Tabel 3.17 Data Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM)
27. Tabel 3.18 Analisis Capaian Kinerja Tujuan dengan Indikator IPLM
28. Tabel 3.19 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2022 dan Tahun 2023 Target Kinerja Akhir RPJMD
29. Tabel 3.20 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Perpustakaan
30. Tabel 3.21 Data Perpustakaan yang ber NSP/Aktif
31. Tabel 3.22 Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran dengan Indikator Rasio Perpustakaan Aktif
32. Tabel 3.23 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2022 dan Tahun 2023 Target Kinerja Akhir RPJMD
33. Tabel 3.24 Komposisi Alokasi Anggaran pada Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2023
34. Tabel 3.25 Capaian Kinerja Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis Dinarpus Tahun 2023
35. Tabel 3.26 Analisis atas Efektifitas Penggunaan Anggaran
36. Tabel 3.27 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
37. Tabel 3.28 Capaian Kinerja Anggaran Pendanaan dan Realisasi dari Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja merupakan suatu laporan yang memberikan informasi mengenai tingkat keberhasilan yang dicapai oleh instansi pemerintah dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan program-program yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan ini sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel, merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran yang telah dilaksanakan.

Tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga adalah untuk mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberikan mandat/amanat, dengan demikian Laporan kinerja merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Laporan kinerja menjadi dokumen laporan kinerja yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

B. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga yaitu meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Perpustakaan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Kinerja Instansi Pemerintah Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 63 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga.

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tentang Peraturan Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 adalah :

1. Memberikan informasi capaian kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi.
2. Memberikan bahan evaluasi sebagai masukan untuk peningkatan kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga;
3. Umpan balik bagi peningkatan kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga;
4. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien dan responsif.
5. Sebagai bukti laporan realisasai program dan hasil kegiatan kepada publik.

D. Gambaran Umum DINARSPUS Kabupaten Purbalingga

1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 63 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga, maka Susunan Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga terdiri dari ;

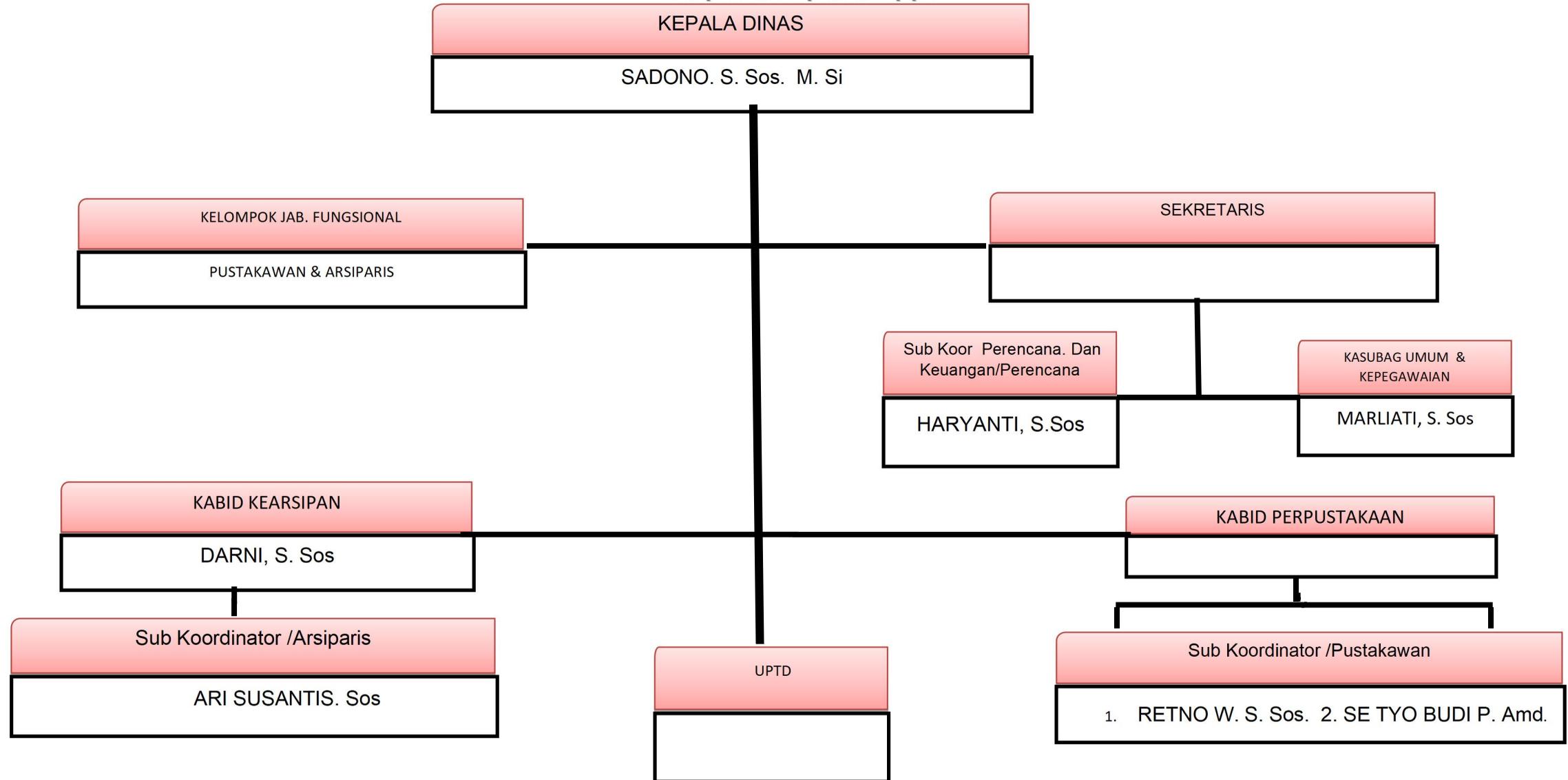
1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
3. Kepala Bidang Kearsipan
4. Kepala Bidang Perpustakaan

5. Jabatan Fungsional

6. UPTD

Dari jabatan fungsional Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga sudah ada 7 orang PNS sebagai tenaga fungsional yaitu 5 orang jabatan fungsional dari penyetaraan pejabat setruktural (1 Perencana, 2 Pustakawan dan 2 Arsiparis) dan 3 (tiga) orang fungsional murni (1 pustakawan dan 2 Arsiparis), untuk UPTD sampai sekarang pemerintah Kabupaten Purbalingga belum membentuk UPTD yang mempunyai tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga, sebagaimana tersebut dalam pasal 25 Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022. Sedangkan bagan stuktur organisasi sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga beserta personilnya adalah sebagai berikut :

Gambar . 1.1.
 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
 KABUPATEN PURBALINGGA



3 Kepegawaian

a. Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel. 1.1
Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAIMN	JUMLAH
1	LAKI-LAKI	26
2	PEREMPUAN	16
	JUMLAH	42

(Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian s/d Desember 2023)

a. Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel. 1.2
Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	SARJANA STRATA 2	1
2	SARJANA STRATA 1	22
4	D3/ SARMUD	4
5	D2	1
6	SMA/SMK ATAU sederajat	13
7	SMP ATAU Sederajat	1
	JUMLAH	42

(Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian s/d Desember 2023)

b. Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan.

Tabel. 1.3
Data Pegawai berdasarkan pangkat dan golongan

NO	PANGKAT/ GOLONGAN	JUMLAH
1	Pembina Utama Muda IV/c	1
2	Pembina Tk.I IV/b	0
3	Pembina IV/a	0
4	Penata Tk.I III/d	7
5	Penata III/c	1
6	Penata Muda Tk.I III/b	3
8	Pengatur Tk.I II/d	2
	Jumlah Total	14

(Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian s/d Desember 2023)

d. Pegawai Menurut Status Kepegawaian

Tabel.1.4
Data Pegawai Menurut Status Kepegawaian

NO	JENIS KEPEGAWAIAN	JUMLAH
1	PNS	14
2	P3K	2
3	THL	25
4	PTT	1
	JUMLAH	42

(Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian s/d Desember 2023)

e. Data Komposisi SDM Berdasarkan Fungsi

Tabel. 1.5.
Data Komposisi SDM Berdasarkan Fungsi

No	Bagian/Bidang	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Kepala (Top Manajemen)	1	0	1
2	Sekretaris	0	0	0
	a Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	6	2	8
	b Subkoo Perencanaan dan Keuangan	1	0	1
3	Bidang Kearsipan	1	0	1
	a Subkoo Konservasi	4	2	6
	b Subkoo Pembinaan dan Pengawasan	2	2	4
4	Bidang Perpustakaan	0	0	0
	a Subkoo Pengelolaan Bahan Pustaka	0	3	3
	b Subkoo Layanan dan Pengembangan Minat Baca	8	3	11
	c Subkoo Pembinaan dan Kerjasama Perpustakaan	5	3	8
Jumlah Total		26	16	42

4 Daftar Aset yang dikelola

Tabel. 1.6
Data Sarana Prasarana dan Peralatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kabupaten Purbalingga

NO	NAMA PERLENGKAPAN	JUMLAH	SATUAN
1	Bangunan Gedung	11	Lokasi
2	Kendaraan Roda Dua (Motor)	11	Unit
3	Kendaraan Roda Empat (Mobil)	8	Unit
4	Meja	115	Bh
5	Kursi	158	Bh
6	Meja kursi tamu	5	Bh
7	Meja Layanan	2	Bh
8	Kursi pengunjung	6	Bh
9	Lemari	142	Bh
8	Lemari Arsip	15	Bh
9	Lemari Rak	14	Bh
10	Lemari bifet	5	Bh
11	Komputer	55	Bh
12	Laptop	9	Bh
13	Printer	16	Bh
14	Kipas angin	2	Bh
15	Mesin Tik	1	Bh
16	AC	25	Bh
17	Filling Kabinet	8	Bh
18	Lampu sorot	2	Bh
19	Camera	3	Bh
30	Handycamp	1	Bh
31	Saund system	3	Bh
32	TV Plasma	6	BH
34	Loker	10	BH
35	Mix	8	BH
36	Scaner	3	BH
37	LC Proyektor	8	Unit

(Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian s/d Desember 2023)

Tabel 1.7
Koleksi Bahan Pustaka Tahun 2023

NO	KLASIFIKASI	S/D 2023	2023	JUMLAH
1	000 Karya Umum	3.368	8	3.376
2	100 Filsafah	4.157	102	4.259
3	200 Agama	10.507	165	10.672
4	300 Ilmu Sosial	15.535	78	15.613
5	400 Bahasa	2.514	4	2.518
6	500 Ilmu Murni	4.022	32	4.054
7	600 Ilmu Terapan	17.393	165	17.557
8	700 Kesenian, Hiburan dan Olah raga	2.101	71	2.172
9	800 Kesusastraan	17.600	992	18.592
10	900 Geografi dan sejarah umum	3.374	31	3.405
11	CD DVD	827	0	827
	Surat Kabar	1.460	1.452	2.912
	Majalah	728	221	488
	Tabloid	51	107	158
	Jumlah	83.176	3.428	86.603

(Sumber : Bidang Perpustakaan Kondisi s.d Des. 2023)

Tabel. 1.8
Daftar Khasanah Arsip s.d 2023

No	Jenis Asal Arsip	Jumlah Berkas	Keterangan
1	Jumlah arsip inaktif	33.861	Capian sampai dengan 2023
2	Jumlah arsip statis	6.240	Capian sampai dengan 2023
3	Jumlah arsip vital	1.831	Capian sampai dengan 2023

(Sumber : Bidang Kearsipan Kondisi s.d Des. 2023)

E. Fungsi Strategis dan Permasalahan Utama

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga dimaksud, maka Dinas Kearsipan

dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga secara umum memiliki fungsi strategis, yaitu meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga memiliki mandat yang harus dipertanggungjawabkan dalam kaitannya dengan sasaran Program dan Kegiatan Kearsipan dan Perpustakaan, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas Pengelolaan Kearsipan
2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap perpustakaan

Adapun permasalahan utama (strategic issued) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di bidang kearsipan dan perpustakaan adalah sebagai berikut :

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN PURBALINGGA

NO.	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS	DAMPAK	SOLUSI
A.	Bidang Perpustakaan			
1	Pemerataan Layanan Perpustakaan	Masih minimnya perpustakaan umum (yang terdiri dari perpustakaan desa, perpustakaan kecamatan), perpustakaan khusus (perpustakaan instansi pemerintah / dinas)	Mengakibatkan kurangnya minat baca masyarakat dikarenakan masih terbatasnya sumber literasi yang kurang memadai	Perlunya komitmen dari pimpinan instansi / pemerintah untuk mendirikan perpustakaan di instansinya (dari 18 kecamatan di Purbalingga belum ada 1 pun kecamatan yang memiliki perpustakaan)
2	Pemerataan Koleksi Perpustakaan	Adanya UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan belum dapat dilaksanakan secara optimal oleh pimpinan lembaga / instansi agar mengalokasikan sebagian anggarannya untuk perpustakaan	Sumber literasi banyak yang ketinggalan dengan perkembangan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat dikarenakan minimnya sumber literasi baru	Perlunya komitmen dari pimpinan untuk mengalokasikan anggarannya untuk pengadaan koleksi buku baik cetak maupun digital minimal 5%

3	Pemerataan Tenaga Perpustakaan	Perpustakaan di wilayah Purbalingga pada umumnya dikelola dengan kurang profesional karena masih banyak orang bekerja di perpustakaan merupakan pekerjaan sampingan	Pengelolaan perpustakaan yang tidak memadai mengakibatkan masyarakat enggan berkunjung ke perpustakaan di wilayah	Perlunya komitmen dari pimpinan instansi / pemerintah untuk mengangkat atau menunjuk tenaga / karyawan yang memiliki kemampuan dan ilmu pengetahuan tentang perpustakaan dan bukan lagi menjadikan sebagai tenaga sambilan
4	Tingkat Kunjungan Pemustaka	Kondisi perpustakaan di Kabupaten Purbalingga pada umumnya tidak menarik sehingga membuat masyarakat / pemustaka menjadi enggan untuk berkunjung ke perpustakaan	Masyarakat merasa tidak nyaman berkunjung ke perpustakaan.	<ul style="list-style-type: none"> - Perlu adanya pembangunan gedung perpustakaan yang lebih representatif yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana perpustakaan yang lengkap diantaranya jumlah koleksi yang lengkap dan tersedia sarana internet. ,, , - Layanan Hari Sabtu (LARISA) - Layanan Hari Minggu (LARIMU) - Layanan Hari Minggu (LARIMU) - Ayo Belajar Di Perpustakaan (AJAR PUSTAKA) - Perpustakaan Keliling (PERPUSLING), dan Motor Pintar.
5	Perpustakaan yang berStandar Nasional Perpustakaan (NSP)	Masih banyak perpustakaan yang belum berstandar Nasional Perpustakaan di wilayah Kabupaten Purbalingga	Perpustakaan yang tidak standar mengakibatkan masyarakat ditinggal masyarakat dan mencari tempat baca yang lebih berstandar (warnet, dsb)	Mengupayakan pembangunan perpustakaan dengan mendasari pada standar pendirian perpustakaan dari Perpusnas.

6	Keterlibatan Masyarakat Dalam Sosialisasi Perpustakaan	Masih sedikitnya kegiatan-kegiatan perpustakaan yang diikuti oleh masyarakat	Perpustakaan bersifat statis / monoton karena masyarakat lebih senang pada kegiatan yang inovatif dan kreatif sesuai kebutuhan masa kini	Mengadakan kegiatan yang berbasis pada kegiatan literasi yang berbasis inklusi sosial
7	Jumlah Pemustaka	Masih sedikitnya masyarakat yang mau mendaftarkan dirinya menjadi anggota perpustakaan sehingga perpustakaan yang ada belum dapat dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat	Perpustakaan sepi peminat karena kurang promosi mengakibatkan enggan menjadi anggota perpustakaan (jumlah pemustaka / anggota perpustakaan sedikit)	Melaksanakan sosialisasi dan promosi perpustakaan kepada masyarakat melalui berbagai jenis media
B.	Bidang Kearsipan			
1	Masih rendahnya pengelolaan arsip secara baku di beberapa instansi pemerintah maupun swasta, desa / kelurahan dan ormas lainnya	Masih kurangnya SDM yang berkompeten dalam bidangnya, yaitu dibidang kearsipan	Pengelolaan arsip tidak optimal karena kearsipan mmebutuhkan pengelola khusus yang tekun, teliti serta mempunyai tingkat kedisiplinan	Perlu dilaksanakan pelatihan atau bimtek bagi pengelola arsip
2	Belum tersedianya ruang penyimpanan arsip yang sesuai standar karena belum adanya Depo Arsip	Banyaknya berkas arsip yang milik pemerintah daerah yang perlu tempat yang luas dan memadai serta memenuhi standar pemeliharannya	Tempat penyimpanan arsip masih terkesan acak-acakan bahkan mirip sebuah gudang, seharusnya memerlukan tempat yang memadai	Perlu dibangun Depo Arsip oleh pemerintah daerah
3	Minimnya tenaga pengelola arsip	Berkas arsip dinamis maupun statis yang dimiliki oleh instansi pemerintah sangat banyak dan tidak sebanding dengan jumlah tenaga yang tersedia	Banyak arsip statis dan dinamis yang tidak tertata dengan baik terlalu lama menumpuk di ruang pengelolaan arsip	- Perlu adanya perekrutan atau pengangkatan tenaga pengelola arsip - Perlu ruang khusus penyimpanan arsip di setiap OPD
4	Digitalisasi Arsip, belum optimal alih media arsip	Upaya / kegiatan pengalihan media arsip belum optimal	Arsip banyak yang menumpuk dan memakan tempat	Perlu alih media arsip secara digital (SRIKANDI, SIMERU)

5	Peningkatan Indeks Kearsipan.	OPD banyak yang belum menerapkan pengelolaan arsip secara baku	Indeks Kearsipan dimungkinkan menurun	Perlu komitmen OPD untuk mengelola arsip secara baku
---	-------------------------------	--	---------------------------------------	--

F. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan Laporan kinerja adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Tahun 2023 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 yang bersangkutan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- a. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- b. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
- d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga. Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026, yaitu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Bupati Purbalingga terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel.

Sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga harus memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan RPJMD Pemerintah Kabupaten Purbalingga 2021-2026, melalui pembangunan Kearsipan dan Perpustakaan yang berkualitas dan pelaksanaan tugas-tugas lainnya dari Bupati. Pembangunan Kearsipan dan Perpustakaan tersebut dilihat dari:

- 1) Adanya tujuan, target dan sasaran yang jelas dan terukur;
- 2) Adanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar-daerah, antar-ruang, antar-waktu, dan antar-fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah;
- 3) Adanya keterkaitan dan konsistensi antara pembuat Kebijakan, Pengawasan (Auditor), pelaksanaan (Operator), dan Masyarakat Purbalingga pada umumnya.
- 4) Integrasi (keterkaitan) dan konsistensi antara pencapaian tujuan pembangunan.

Perencanaan kinerja merupakan aktivitas pembahasan perencanaan di awal tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan dan dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan.

Proses penetapan kegiatan tahunan yang disertai indikator kinerja dan tingkat capaiannya berdasarkan program/kegiatan, kebijakantujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra). Memperhatikan hal tersebut, Rencana kerja Dinas Kerasipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga telah disusun dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kerasipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2026, Rencana Kerja Dinas Kerasipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 adalah merupakan pelaksanaan tahun ke tiga dari Renstra yang telah disusun pada Tahun 2022, serta merupakan bagian dari arah Pembangunan Daerah dalam RPJPD Kabupaten Purbalingga.

1. Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga dibuat berdasar pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Purbalingga tahun Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga tahun Tahun 2021-2026, dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparatur di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Jangka Menengah dan Target Rencana Kerja Tahunan Renja OPD.

Untuk mewujudkan Renstra perlu ditunjang dengan Visi dan Misi. Berikut Visi dan Misi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga merujuk pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga :

1. Visi

Untuk menuju kepada keadaan masyarakat Purbalingga yang diinginkan dimasa depan dirumuskan Visi Kabupaten Purbalingga yakni **“Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat yang Sejahtera yang Berakhlak**

Mulia". Dengan adanya rumusan visi tersebut, Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 ini disusun dengan maksud sebagai penjabaran secara operasional Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga, yang akan menjadi pedoman, arah dan target pencapaian pembangunan melalui bidang kearsipan dan perpustakaan di Kabupaten Purbalingga selama 5 (lima) tahun ke depan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Sebagai pedoman/acuan perencanaan yang akan menentukan arah kebijakan pembangunan bidang kearsipan dan perpustakaan selama lima tahun ke depan (Tahun 2021-2026);
- b. Sebagai bahan evaluasi dan tolok ukur kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga;
- c. Sebagai pedoman dan bahan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan bagi semua pemangku kebijakan (stakeholders) dan instansi terkait dalam berperan aktif untuk mencapai tujuan dan sasaran;
- d. Merumuskan kebijakan dan program strategis guna meningkatkan efisiensi, efektivitas dan kinerja dalam pelaksanaan pemerintahan berdasarkan pada prinsip-prinsip Good Governance;
- e. Sebagai pedoman bagi seluruh jajaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Misi

Dalam mewujudkan visi pemerintah Kabupaten Purbalingga juga menetapkan 7 (tujuh) misi sebagai sarana dalam mewujudkan visi tersebut. Adapun 7 (tujuh) misi pemerintah Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat;
2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT / Tuhan YME, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan terciptanya rasa aman dan tenteram dalam kehidupan

- bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok masyarakat utamanya pangan dan papan secara layak;
 4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat;
 5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat dengan mendorong simpul simpul perekonomian utamanya dalam industri pengolahan dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja;
 6. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa;
 7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah / Infrastruktur dengan tetap memperhatikan Kelestarian Lingkungan.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga mempunyai peran dan kontribusi dalam tercapainya seluruh misi pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga utamanya misi kesatu : **“Menyelenggarakan Pemerintahan Yang Profesional, Efektif, Inovatif, Bersih Akuntabel Dan Demokratis, Sehingga Mampu Memberikan Pelayanan Secara Prima Kepada Masyarakat”** dan misi ke empat yakni **“Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Utamanya Melalui Peningkatan Derajat Pendidikan Dan Derajat Kesehatan Masyarakat”**. Dengan demikian Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga harus menyelenggarakan pelayanan dibidang Kearsipan dan Perpustakaan yang profesional dan pelayanan yang prima(**excellent service**)

Profesional dimaknai sebagai pola pikir, pola sikap dan pola tindak yang sistematis, transparan dan akuntabel dari para pelaku jajaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten

Purbalingga. Pelayanan prima dimaknai sebagai suatu pola layanan terbaik dalam manajemen modern yang mengutamakan kepedulian terhadap pelanggan, dan pelayanan yang memenuhi standar kualitas yang sesuai dengan harapan dan kepuasan pelanggan.

2. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga yaitu **“Meningkatkan kualitas pengelolaan kearsipan dan Meningkatnya pengetahuan dan literasi masyarakat”**. Hal ini selaras dengan tujuan yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga **“Terwujudnya Kabupaten Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat yang Sejahtera yang Berakhlak Mulia”** dengan cara **Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, dan Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat.**

Dari gambaran tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Tujuan dari Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga yakni :

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan kearsipan dengan indikator indek kearsipan
2. Meningkatnya pengetahuan dan literasi masyarakat dengan indikator rasio Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat.

3. Sasaran Strategis

Sasaran strategis dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga adalah :

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan kearsipan dengan indikator Kenaikan persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku.
2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap perpustakaan dengan indikator rasio perpustakaan aktif per 10.000 penduduk.

Indikator tersebut menjadi Indikator Kinerja Utama yang akan dicapai oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga pada Tahun 2023.

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

Berdasarkan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan, bahwa Perjanjian Kinerja (PK) yang disepakati antara Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga dengan Bupati Purbalingga Tahun 2023, yaitu sebagai berikut:

Tabel. 2.1
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Kearsipan		Indek Kearsipan	Persen	76
		Meningkatnya Implementasi SAKIP DINARSPUS	Nilai SAKIP	Nilai	72,50
1		Meningkatkan Kuantitas Pengelolaan Kearsipan	Kenaikan prosentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	persen	64
2	Meningkatnya Pengetahuan dan Literasi Masyarakat		Indeks Pembangunan Lietasi	Indeks	12
3		Meningkatnya akses masyarakat terhadap perpustakaan	Rasio Perpustakaan Aktif	Rasio	4,08

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

No	Program	Anggaran	Ket
1	Program Penunjang urusan Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah	3.437.261.000,-	APBD
2	Program Pembinaan Perpustakaan	2.104.159.000,-	APBD
3	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	25.000.000,-	APBD
4	Program Pengelolaan Arsip	80.545.000,-	APBD
5	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	42.500.000,-	APBD

Dari tabel diatas dapat jabarkan dalam program operasional yang merupakan proses penentuan jumlah, jenis sumber daya dan dana

yang diperlukan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan menetapkan dan melaksanakan 5 (lima) program operasional yaitu:

1. Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kab./Kota
2. Program Pembinaan Perpustakaan
3. Program Pengelolaan Arsip.
4. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno.
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota.

BAB. III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ataupun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga.

Dalam bab ini akan diuraikan tentang akuntabilitas kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga pada tahun 2023 yang bertujuan untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga 2021-2026, yang dituangkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan 2023 dan Penetapan Kinerja 2023. Selain itu, dibahas pula akuntabilitas keuangan dari seluruh anggaran yang diterima Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga tahun 2023 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purbalingga tahun anggaran 2023.

A. CAPAIAN KINERJA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

1. Pengukuran Kinerja

Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran keberhasilan (baik kuantitatif maupun kualitatif) yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan mengenai apa yang diukur untuk menentukan apakah sasaran telah tercapai. Karena itu, pencapaian sasaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga dapat dilakukan dengan menilai seberapa jauh indikator kinerja telah tercapai. Pengukuran kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran, atau dengan kata lain membandingkan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran menggunakan skala pengukuran 4 (empat) katagori. Untuk lebih jelasnya dari ke-empat pengukuran tersebut juga terdapat dua jenis skala penilaian pengukuran yakni apabila Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, maka skala yang digunakan sebagai berikut :

Tabel. 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91% ≤ 100	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75 %	Sedang
4.	51% ≤ 55%	Rendah
	≤ 50%	Sangat Rendah

2. Capaian Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target 2023.

Capaian kinerja di Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga berdasarkan perjanjian kinerja yang ditetapkan terdiri dari dua indikator tujuan strategis dan tiga indikator sasaran strategis yang akan dicapai.

Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan menetapkan target yang akan dicapai pada tahun 2023, yang sejalan dengan target Renstra sampai tahun ke 5. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga tahun 2023, dalam pencapaian masing-masing indikator di sajikan pada tabel berikut ini :

Tabel. 3.2
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja
Pada Setiap Indikator Tujuan dan Sasaran Tahun 2023

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Predikat
TUJUAN :							
1	Meningkatnya Pengelolaan Kualitas Kearsipan	Indeks kearsipan	Indeks	76	84,09	110,64	Sangat Tinggi
SASARAN :							

1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kearsipan	Kenaikan prosentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	persen	64	69,3	108,28	Sangat Tinggi
2	Meningkatkan Implementasi SAKIP DINARSPUS	Nilai SAKIP DINARSPUS	Nilai	72,50	73,1	100,82	Sangat Tinggi
TUJUAN :							
2	Meningkatkan pengetahuan dan literasi masyarakat	Indeks pembangunan literasi	persen	12	12,02	100,16	Sangat Tinggi
SASARAN :							
		rasio perpustakaan aktif	rasio	4,08	4,59	112,5	Sangat Tinggi

Sedangkan untuk evaluasi dan analisis tingkat capaian kinerja terhadap setiap Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing tujuan Strategis dan Sasaran Strategis Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga pada tahun 2023 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. TUJUAN I : “MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN KEARSIPAN”

Penyelenggaraan kearsipan yang dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga yang terdapat di dalam Renstra ialah Meningkatkan Pengelolaan Kualitas Kearsipan. Hal ini dimaksudkan agar kualitas pengelolaan kearsipan di setiap unit kearsipan yang terdapat di wilayah Kabupaten Purbalingga dapat terkelola dengan baik sesuai dengan kaidah – kaidah yang berlaku dalam standar pengelolaan arsip. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagai Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Purbalingga bertanggung jawab dalam pembinaan dan sekaligus melaksanakan

pengawasan kearsipan yang dilaksanakan oleh masing masing unit kearsipan dalam pengelolaan arsip. Masing – masing unit kearsipan akan mendapatkan penilaian yang merupakan hasil dari pelaksanaan setiap komponen dalam pengelolaan arsip.

Tujuan dari Meningkatnya Pengelolaan Kualitas Kearsipan dapat diukur melalui indicator Indek Kearsipan yaitu angka atau bobot nilai yang diperoleh dari hasil pengawasan kearsipan yang dilakukan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagai Lembaga Kearsipan Daerah dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah sebagai instansi vertical.

Dengan demikian pengawasan kearsipan dapat dikelompokkan menjadi pengawasan kearsipan internal dan pengawasan kearsipan eksternal. Yang dimaksud dengan Pengawasan Kearsipan Internal adalah pengawasan dan penilaian yang dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga terhadap unit kearsipan di wilayah Kabupaten Purbalingga dalam penyelenggaraan kearsipan di masing masing unit kearsipan tersebut.

Berkaitan dengan Indek Kearsipan maka rumus perhitungan terhadap indicator ini adalah Jumlah skor yang diperoleh dari 40% persen hasil pengawasan internal ditambah dengan 60% persen dari pengawasan eksternal. Sehingga diperoleh rumus perhitungan sebagai berikut :

$$IK = (\text{Nilai PI} \times 40\%) + (\text{Nilai PE} \times 60\%)$$

Keterangan :

IK = Indek Kearsipan

PE = Pengawasan Eksternal

PI = Pengawasan Internal.

1. PENGAWASAN KEARSIPAN EKSTERNAL

Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa yang dimaksud dengan pengawasan eksternal kearsipan adalah Pelaksanaan audit pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah terhadap pelaksanaan tata kelola/ pengelolaan arsip di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga sebagai Lembaga Kearsipan Daerah, dan pelaksanaan tersebut telah dilaksanakan pada bulan Mei s.d. Juli 2023 yang meliputi

Lima (5) aspek yang dievaluasi. Dan hasil dari ke - 5 (Lima) aspek dari hasil pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.3
REKAPITULASI HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN EKSTERNAL
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN
PURBALINGGA TAHUN 2023

No	Aspek/ Komponen	Nilai	Nilai Standar	Skor %	Bobot Kom.	Nilai Kom.	Bobot Aspek	Nilai Aspek
1.	Aspek Kebijakan	2020	2100	96%		96,57%	30%	28,97
2.	Aspek Pembinaan	1330	1500	89%		89,33	20%	17,87
3.	Aspek Pengelolaan Arsip Inaktif dengan retensi sekurang kurangnya 10 th	1380	1500	92%		92	10%	9,2
2.	Aspek Pengelolaan Arsip Statis	2040	2500	82%		81,6	20%	16,32
3.	Aspek Sumber Daya Kearsipan	2040	2800	73%		73,04	20%	14,608
	TOTAL NILAI	8810	10400	85%	Nilai Hasil			86.97
					Kategori A (MEMUASKAN)			

(Sumber data Bidang Kearsipan Hasil Audit Pengawasan Tahun 2023)

Dari tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa hasil dari pengawasan kearsipan yang dilakukan oleh Dinas Kearsipan dan perpustakaan Provinsi Jawa Tengah terhadap LKD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga adalah 86.97. Dengan demikian bobot dari penilaian pengawasan kearsipan eksternal adalah = **PE : (60 % X 86.97) = 52,18.**

2. PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL

Pengawasan Kearsipan Internal Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 dilaksanakan pada Bulan Pebruari s/d Juli 2023 dengan Obyek Pengawasan sebanyak 26 OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan aspek atau komponen penilaian yang dilakukan meliputi :

A. Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis

Terdiri dari Sub Aspek :

- 1) Sub Aspek penciptaan
- 2) Sub Aspek Penggunaan
- 3) Sub Aspek Pemeliharaan
- 4) Sub Aspek Penyusutan.

B. Aspek Sumber Daya Kearsipan

Terdiri dari Sub Aspek :

- 1) Sub Aspek Prasarana dan Sarana
- 2) Sumber Daya Manusia

Setelah dilakukan penilaian pada masing - masing aspek / komponen kearsipan tersebut dapat diperoleh data sebagai berikut :

Tabel. 3.4
Hasil Monitoring Pengawasan Kearsipan Internal
Pemerintah Kabupaten Purbalingga

No	Nama Perangkat Daerah	Nilai	Kategori
1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	86	A (Memuaskan)
2.	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah	86	A (Memuaskan)
3.	BAKEUDA	85	A (Memuaskan)
4.	Dinas Kesehata	85	A (Memuaskan)
5.	Dinporapar	84,5	A (Memuaskan)
6.	Dinpoermasdes	84	A (Memuaskan)
7.	Dipendukcapil	84	A (Memuaskan)
8.	Dinkop UKM	84	A (Memuaskan)
9.	Dinhub	83	A (Memuaskan)
10.	Dinrumkin	83	A (Memuaskan)
11.	Satpol PP	82	A (Memuaskan)
12.	Bappelitbangda	81	A (Memuaskan)
13.	DPUPR	81	A (Memuaskan)
14.	Dinkominfo	80	A (Memuaskan)
15.	Inspektorat	79	BB (Sangat Baik)
16.	Bakesbangpol	79	BB (Sangat Baik)
17.	Dindikbud	78.5	BB (Sangat Baik)

18.	DKPP	78	BB (Sangat Baik)
19.	DinsosdaldukKBP3A	77	BB (Sangat Baik)
20.	DPMPTSP	77,28	BB (Sangat Baik)
21.	Setda	76	BB (Sangat Baik)
22.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	76	BB (Sangat Baik)
23.	Dinas Pertanian	75	BB (Sangat Baik)
24.	Dinas Tenaga Kerja	75	BB (Sangat Baik)
25.	Dinas Lingkungan Hidup	72	BB (Sangat Baik)
26.	Sekretariat DPRD	63	B (Baik)
	Jumlah	2074,3	
	Rata - rata nilai	79.78	BB (Sangat Baik)

(Sumber data Bidang Kearsipan Hasil Audit Pengawasan Th 2023)

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Nilai Audit Pengawasan Kearsipan Internal Pemerintah Kabupaten Purbalingga nilai rata rata yang diperoleh adalah 79,78. Sehingga diperoleh bobot penilaian pengawasan internal kearsipan sebagai berikut : **PI = (40 % X 79,78) = 31,91**

Dengan mendasari pada hasil penilaian pengawasan internal dan pengawasan eksternal maka indek kearsipan yang merupakan indicator dari Tujuan Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kearsipan diperoleh hasil sebagai berikut :

Rumus Formulasi Pengukuran Indeks Kearsipan =

$$IK = (\text{Nilai PE} \times 60\%) + (\text{Nilai PI} \times 40\%)$$

$$IK = 31,91 + 52,18$$

$$IK = \mathbf{84,09 \text{ (Kategori A / Memuaskan)}}$$

Keterangan :

IK = Indek Kearsipan

PE = Pengawasan Eksternal

PI = Pengawasan Internal

Secara ringkas dapat disimpulkan dalam bentuk tabel capaian kinerja terhadap indikator tujuan adalah sebagai berikut :

Tabel.3.5
Pengukuran Capaian Kinerja Tujuan Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2023

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Predikat
----	--------	-------------------	--------	-------------	----------------	-----------	----------

TUJUAN :							
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kearsipan	Indeks kearsipan	Indeks	76	84,09	110,64	Memuaskan

Tabel pengukuran capaian kinerja di atas menunjukkan bahwa indikator kinerja Indeks kearsipan dengan target sebesar 76 dapat terealisasi sebesar 84,09 sehingga capaian tersebut bila dikonversi dalam prosentase sebesar 110,64 persen. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat selisih capaian target yang sangat signifikan sehingga capaian ini dapat dikategorikan memuaskan/sangat tinggi.

2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tujuan Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Kearsipan dengan Indikator Indek Kearsipan adalah sebagaimana disajikan pada table dibawah ini :

Tabel. 3.6
Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tujuan
Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023 (%)
Indeks Kearsipan	Angka	NA	NA	66,64	68.62	76	84,09	110,64

Tabel Evaluasi dan analisis Kinerja Tujuan di atas dapat diasumsikan bahwa terdapat progres yang meningkat terkait capaian kinerja Indeks Kearsipan dari tahun 2021 dengan realisasi sebesar 68,62 jika dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 76 dan realisasi capaian sebesar 84,09 atau ada progres prosentase sebesar 110,64 persen.

3. Capaian Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Akhir RPJMD

Tabel 3.7

Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2022 dan Tahun 2023 Target Kinerja Akhir RPJMD

No	Tujuan	Indikator kinerja tujuan	Satuan	Tahun 2022		Capaian %	Tahun 2023		Capaian %	Kondisi Kinerja Akhir		Proses Kinerja Akhir RPJMD
				Target	Realisasi		Target	Realisasi		%	Target Kinerja Akhir RPJMD	
1	Meningkatkan kualitas pengelolaan kearsipan	Indeks Kearsipan	indeks	73	68,62	94	76	84,09	110,64	80	110,64	100

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2022 capaian indikator kinerja tujuan yakni indeks kearsipan target yang dipasang tidak terpenuhi yakni sebesar 73 tetapi realisasi hanya sebesar 68,62, sehingga prosentase capaian hanya 94 persen. Ini berbanding terbalik dengan target indeks kearsipan pada tahun 2023 sebesar 76 dengan realisasi sebesar 84,09 kalo dihitung dengan prosentase sebesar 110,64 persen. Capaian realisasi ini juga melampaui target kinerja akhir RPJMD sebesar 80, dan target prosentase kinerja akhir RPJMD sebesar 105,11 persen, ini menunjukkan bahwa capaian indeks kearsipan sudah melampaui target RPJMD dengan kategori Sangat Tinggi.

2. SASARAN 1 : “MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEARSIPAN”

Secara singkat dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan meningkatnya kualitas pengelolaan kearsipan adalah banyaknya unit unit kearsipan seperti, OPD, Ormas, Desa, Kelurahan, Organisasi Sosial Politik, Sekolah dan lainnya yang menerapkan tata kelola arsip di unit kerjanya yang sudah sesuai dengan kaidah-kaidah atau norma – norma yang baku/ sesuai standar kearsipan. Dalam mengelola arsip baik yang bersifat dinamis maupun statis sudah sesuai dengan aturan atau kaidah yang berlaku. Dengan menggunakan tata kelola arsip yang sudah baku akan berdampak pada pemberian layanan kepada masyarakat dengan mudah dan cepat. Selain itu dengan pengelolaan arsip yang baik akan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga berpengaruh pada layanan kepada publik / masyarakat.

Keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan indicator kenaikan prosentase perangkat daerah/OPD yang menerapkan pengelolaan kearsipan secara baku/ tata kelola arsip di setiap unit kerja yang sudah menggunakan kaidah-kaidah yang baku sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam Renstra 2021-2026 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga telah menetapkan target kenaikan prosentase sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Tahun 2023.

Hasil pengukuran capaian kinerja tahun 2023 diperoleh gambaran sebagaimana disajikan pada tabel 3

Tabel 3.8

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kuantitas Pengelolaan Kearsipan Secara Baku

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Predikat
SASARAN :							
1	Meningkatnya kuantitas pengelolaan kearsipan	Kenaikan Prosentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	persen	64	69,3	108,28	Memuaskan

Dari hasil pendataan dan pembinaan yang dilakukan oleh bidang kearsipan sampai dengan bulan Oktober 2023 diperoleh jumlah OPD, Ormas, Desa, Kelurahan, Organisasi Sosial Politik, Sekolah dan lainnya sejumlah 374, sedangkan yang telah melaksanakan pengelolaan arsip di unit kerjanya dengan secara baku

pada Tahun 2023, sejumlah 259 unit kearsipan, dengan demikian dari awal Renstra 2021-2026 sampai dengan 31 Desember 2023 jumlah unit kearsipan di wilayah Kabupaten Purbalingga yang telah mengelola arsip secara baku sejumlah 259 unit kearsipan.

Sedangkan dari data tersebut diatas dapat dihitung capaian kinerja dari indikator ini dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

Formulasi Pengukuran :

$$= \frac{\text{jumlah OPD/BUMD/Lembaga/Unit Kearsipan daerah yang telah melaksanakan kaidah kaidah kearsipan secara baku}}{\text{jumlah OPD/BUMD/Lembaga/Unit Kearsipan daerah}} \times 100$$

$$= \frac{259}{374} \times 100 = 69,3$$

Dengan demikian jumlah Kenaikan persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku sampai dengan Tahun 2023 sebanyak 69,3 unit kearsipan / instansi dan dengan target 64 dengan capaian kinerja sebesar 108,28 dengan kategori “Sangat Tinggi”.

2. Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran dengan Indikator Persentase Kenaikan OPD/Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku.

Tabel. 3.9
Perbandingan Analisis Antara Target Dan Realisasi Tahun 2023 Dengan Indikator Persentase Kenaikan OPD Yang Mengelola Arsip Secara Baku.

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023 (%)
Persentase Kenaikan perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	Persen	NA	NA	63	64	69,3	108,28

Pada tahun 2021 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan belum menargetkan prosentase bagi perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku sebagai indikator kinerja. Kalau kita lihat perangkat daerah yang telah mengelola arsip secara baku berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2022 terdapat target sebesar 63 persen dari seluruh perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku, sedangkan realisasi sebesar 63 persen atau realisasi 100 persen.

Sedangkan tahun 2023 target perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku sebesar 64 persen sedang capaian realisasi sebesar 69,3 atau sebesar 108, 28 persen, ini menunjukkan bahwa ada peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan target dan realisasi pada tahun 2022, dan dapat dikategorikan sangat tinggi.

3. Capaian Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Akhir RPJMD

Tabel 3.10

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2022 dan Tahun 2023 Target Kinerja Akhir RPJMD

No	Sasaran	Indikator kinerja sasaran	Satuan	Tahun 2022		Capaian %	Tahun 2023		Capaian %	Kondisi Kinerja Akhir		Prosentase Kinerja RPJMD
				Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target Kinerja Akhir RPJMD	Capaian 2023	
1.	Meningkatkan kualitas pengelolaan kearsipan	Kenaikan prosentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	persen	63	63	100	64	69,3	100	67	100	143,73

Tabel di atas dapat kita simpulkan bahwa terdapat kenaikan yang signifikan dalam hal kenaikan prosentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku, jika dilihat dari target dan capaian sarsaran Tahun 2022 dan tahun 2023 serta target kinerja akhir RPJMD. Pada tahun 2022 perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku ditargetkan sebesar 63 dengan realisasi sebesar 63, ini menunjukkan ketercapaian target dan capaian aebesar 100 persen. Pada tahun 2023 target terpasang perangkat daerah yang telah mengelolaarsip secara baku sebesar 64 dan realisasi sebesar 69,3 denga capaian sebesar 108,28 persen, dapat disimpulkan bahwa kondisi kinerja akhir sebesar 67 pada tahun 2023 dapat tercapai 100 persen.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan Atau hambatan/kendala Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan :

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan.

Dari capaian indikator kinerja tahun 2022 ada beberapa factor keberhasilan yaitu ;

- 1 Telah dilakukan pembaharuan dan penambahan fitur sistim otomasi kearsipan/Sitim Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) sehingga dapat mendukung dan menyelamatkan arsip yang bernilai guna.
- 2 Dukungan dari semua Kepala Unit Kerja/ stakeholder dalam melaksanakan otomasi kearsipan di masing-masing unit kerja.
- 3 Dukungan dan semangat kerja pengelola Arsip untuk mewujudkan tertib arsip ditingkat OPD, Desa/Kel. dan BUMD
- 4 Sarana dan Prasarana yang terus diupayakan pengadaanya dalam rangka pemeliharaan arsip di Depo Arsip.

2. Faktor-faktor Penghambat/Kendala.

1. Kurangnya komitmen pimpinan OPD terkait pengelolaan arsip dan kurangnya pemahaman yang cukup bagi OPD akan pentingnya arsip itu sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya arsip dianggap sebagai sesuatu hal yang kurang memiliki nilai, sehingga konsentrasi dan focus pada pemanfaatan arsip belum efektif yang mengakibatkan pengelolaan arsip tidak berjalan dengan optimal.
 - 2 Banyak Organisasi Perangkat Daerah belum mempunyai arsiparis dan terbatasnya pengelola arsip.
 - 3 Sarana daan prasarana kearsipan pada perangkat daerah belum sesuai dengan standar kearsipan.
 - 4 Belum memiliki Gedung Depo Arsip yang representative dari sisi standar pengelolaan arsip.
 - 5 Belum adanya formasi pengisian tenaga ASN sesuai dengan kebutuhan yaitu Arsiparis.
 - 6 Belum teralokasinya anggaran yang cukup dalam rangka mendukung tata kelola kearsipan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
 - 7 Belum berjalannya proses penyusutan arsip sehingga terjadi penimbunan arsip di ruang kerja.
3. Adapun solisi/Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain :

1. Memberikan pemahaman terkait pentingnya pengelolaan arsip melalui kegiatan pembinaan, dan pengawasan kearsipan.
2. Menyelenggarakan bimbingan teknis bagi para pengelola arsip di OPD sehingga mereka akan lebih memahami dalam mengelola arsip OPD masing masing.
3. Membantu penampungan pengelolaan arsip sehingga akan memudahkan temu balik sekaligus dapat mengetahui arsip yang sudah melewati retensi untuk dapat dilakukan penyusutan.
4. Meningkatkan Kapasitas SDM pengelola kearsipan
5. Mengajukan tambahan Tenaga Arsiparis atau tenaga teknis pengelola arsip.
6. Penataan Gedung Depo Arsip yang ada sesuai standar pengelolaan arsip.
7. Mengadakan sosialisasi dan pengawasan secara lebih intensif pada unit unit kearsipan.

Adapun program kegiatan yang menunjang tujuan dan Sasaran ini didukung Program dan kegiatan bidang kearsipan, serta inovasi yang ada pada Bidang Kearsipan adalah :

1. Program dan Kegiatan yang menunjang dibidang kearsipan
 - a. Program Pengelolaan Arsip
 1. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
 2. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
 3. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
 - b. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
 1. Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang berskala Kabupaten Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten yang Digabung dan /atauDibubarkan dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- 2 Inovasi
 1. D'Arbanga (Digital Arsip Purbalingga)
 2. Sig' Bangga (Sistem Informasi Geografis Arsip Purbalingga)
 3. Sarinande (Sistem Informasi arsip Desa)

3. SASARAN 2 : “MENINGKATKAN IMPLEMENTASI SAKIP DINARSPUS DENGAN INDICATOR KINERJA NILAI SAKIP DINARSPUS

Dari hasil evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Tahun 2023 terhadap kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga, diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel. 3.11
Komponen Penilaian SAKIP

No	Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
			Keberadaan (20%)	Kualitas (30 %)	Peman faatan (50 %)	
1	Perencanaan kerja	30,00	6,00	6,30	10,15	22,80
2	Pengungkuran Kinerja	30,00	4,80	6,30	10,50	21,60
3	Pelaporan kinerja	15,00	2,70	3,15	5,25	11,10
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	3,50	5,25	8,75	17,50
Nilai Kinerja	Akuntabilitas	100,00	17,00	21,00	35,00	73,01

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa Nilai SAKIP Dinas Kearsipan dan Perpustakaan memperoleh nilai **73, 01** dengan kategori “ **BB** “ (**Sangat Baik**) dan nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi terhadap komponen dan sub komponen manajemen kinerja pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga. Capaian kinerja untuk indikator ini dapat terlihat dalam tabel berikut ini.

1..Capaian Kinerja

Tabel. 3.12
Capaian Sasaran Meningkatkan Implementasi SAKIP DINARSPUS

No	Sasaran	Indikator kinerja sasaran	Satuan	Tahun 2023		Capaian
				Target	Realisasi	%
1	Meningkatkan Implementasi SAKIP DINARSPUS	Nilai SAKIP	Nilai	72,50	73,01	100,70

Tabel di atas menunjukkan bahwa Capaian sasaran meningkatnya Implementasi SAKIP Dinarsipus dengan target awal sebesar 72, 50 dapat terealisasi sebesar 73, 01 atau prosentase capaian sebesar 100,70 persen.

Sedangkan rekomendasi hasil evaluasi dari Inspektorat yang telah ditindak lanjut sebagai berikut :

Tabel. 3.13
Matrik Tindak Lanjut Sakip Tahun 2023

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI / TINDAK LANJUT	PENANGGUNGJAWAB	STATUS / PROGRES PENYELESAIAN
1	Kepala Dinarpus direkomendasikan agar :			
	a. Menyusun indikator kinerja sub kegiatan pada Perjanjian Kinerja Eselon IV sesuai dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Kodefikasi dan Nomenklatur Daerah	Dinarpus pada TA 2023 telah membuat Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Eselon IV sampai pada Sub Kegiatan (Bukti Terlampir)	Tim Evaluasi SAKIP	Selesai
	b. Melakukan analisis pada dua indikator kinerja tujuan yang tidak tercapai apakah target yang ditetapkan pada satu indikator kinerja tersebut masih relevan dan realistis untuk dicapai dengan mengacu hasil pengukuran dan pelaporan kinerja yang telah disusun. Selanjutnya untuk memanfaatkan hasil pengukuran dan pelaporan kinerja untuk merencanakan aktivitas-aktivitas yang dapat mendukung tercapainya kinerja pada tahun yang akan datang	Berdasarkan review tim internal SAKIP bahwa untuk kedua indikator tersebut masih relevan, hanya perlu perbaikan pada perhitungan rumus yang baku yang sesuai dengan instansi vertikal (Dinarpus Provinsi dan Perpusnas RI, serta ANRI) dan ditambah kegiatan yang menunjang/mendukung tercapainya kinerja tersebut (Jadwal kegiatan terlampir)	Tim Evaluasi SAKIP	Selesai
	c. Menggunakan rencana aksi sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi pencapaian kinerja triwulan dengan membandingkan target-target rencana aksi dengan capaian		Tim Evaluasi SAKIP	Selesai

	kinerja triwulanan			
	d. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja secara memadai agar dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi penyesuaian aktivitas yang mendukung ketercapaian kinerja organisasi. Selanjutnya hasil rapat untuk didokumentasikan (dibuat notulen rapatnya) dan dipantau tindak lanjut atas rekomendasi hasil rapatnya	Dinarpus telah melaksanakan rapat Monitoring dan Evaluasi secara berkala setiap akhir bulan dan triwulanan (Undangan, daftar hadir, dan notulen terlampir)	Tim Evaluasi SAKIP	Selesai
2	Kepala Dinarpus direkomendasikan agar :			
	a. Memastikan agar atasan langsung secara konsisten melakukan pemantauan pengukuran capaian kinerja pegawai dibawahnya	Tindak lanjut Tim Evaluasi Sakip : Telah menyampaikan kepada pimpinan untuk melakukan verifikasi atas laporan kinerja harian pegawai (bawahan) melalui aplikasi Syantika pada tiap harinya	Tim Evaluasi SAKIP	Selesai
	b. Mendukung penggunaan teknologi informasi (aplikasi) untuk pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja yang dikembangkan oleh unit kerja terkait (Dinas Komunikasi dan Informatika)	Dinarpus akan melaksanakan pengukuran dan pengumpulan data kinerja melalui aplikasi satu data yang dikembangkan oleh instansi terkait (Dinkominfo dan dinas terkait lainnya yang mengelola tentang pelaporan kinerja)	Tim Evaluasi SAKIP	Selesai
	c. Meningkatkan kualitas Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan program, kegiatan, dan pengukuran capaian kinerja triwulanan dengan menyajikan pembahasan mendalam terkait hambatan / kendala / permasalahan yang dihadapi sehingga dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi	Dalam rangka meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan, akan melaksanakan rapat pada setiap bulannya dengan para pemangku kegiatan guna membahas realisasi, hambatan dan solusi yang akan dilaksanakan (Notulen rapat terlampir)	Tim Evaluasi SAKIP	Selesai

	penyesuaian strategi / kebijakan / aktivitas yang diperlukan untuk melakukan perbaikan kinerja			
	d. Memastikan rekomendasi-rekomendasi hasil rapat Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran capaian kinerja triwulanan ditindaklanjuti dan didokumentasikan dengan baik	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan telah menindaklanjuti terkait hal tersebut agar para Kepala Bidang (Kabid) mengkoordinir hasil pelaksanaan program kegiatan kepada masing-masing bidang sebagai bahan dalam pelaksanaan evaluasi dan monitoring untuk diagendakan dalam rapat tribulanan, serta semua kegiatan harus dilaporkan dan didokumentasikan (Notulen rapat terlampir)	Tim Evaluasi SAKIP	Selesai
	e. Memastikan seluruh pegawai menyampaikan laporan capaian kinerjanya (pada ekinerja) tepat waktu	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sudah melaksanakan dengan memerintahkan kepada semua pegawai untuk melaporkan ekinerja paling lambat tanggal 6 setiap bulannya, hanya perlu dikuatkan dengan lembar berita acara atau pengumuman secara tertulis	Tim Evaluasi SAKIP	Selesai
3	Kepala Dinarpus direkomendasikan agar :			
	a. Memanfaatkan laporan kinerja sebagai bahan dalam menyusun penyesuaian strategi / kebijakan untuk mencapai kinerja berikutnya	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan akan melaksanakan setiap penyusunan program kerja kegiatan mendasarkan pada evaluasi pelaksanaan kinerja tahun sebelumnya sehingga dalam menentukan target kinerja menjadi lebih terukur	Tim Evaluasi SAKIP	Selesai
	b. Mendorong perubahan kinerja organisasi dengan memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai bahwa seluruh	Tim SAKIP telah meminta kepada pimpinan / Kepala Dinas agar dilaksanakan pembinaan pegawai minimal tribulan sekali	Tim Evaluasi SAKIP	Selesai

	informasi yang tertuang pada Laporan Kinerja terutama informasi capaian kinerja merupakan tanggungjawab seluruh pegawai, sehingga seluruh pegawai berkomitmen untuk mencapai target-target kinerja yang telah diperjanjikan	melalui agenda rapat dan penyampaian pembinaan pegawai setiap pelaksanaan apel rutin setiap minggunya (Jadwal terlampir)		
	a. Meningkatkan kapabilitas Tim Penerapan SAKIP Internal dengan mengikuti pelatihan / sosialisasi / webinar agar dapat menjalankan perannya secara optimal	ASN PNS maupun Non PNS telah mengikuti pelatihan / sosialisasi / webinar yang diadakan Tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Nasional, (Sertifikat terlampir)	Tim Evaluasi SAKIP	Selesai
	b. Menggunakan Rencana Aksi sebagai dasar monitoring dan evaluasi atas pengukuran capaian kinerja tribulanan dengan membandingkan target-target pada rencana aksi dengan capaian kinerja triwulanan	Dinarpus telah membuat jadwal monitoring dan evaluasi atas pengukuran capaian kinerja tribulanan dengan membandingkan target-target pada rencana aksi dengan capaian kinerja triwulanan (Jadwal MONEV terlampir)	Tim Evaluasi SAKIP	Selesai
	c. Mendokumentasikan dan meningkatkan kualitas Rapat Monitoring dan Evaluasi Internal dengan melakukan pendalaman yang memadai terkait efektifitas dan efisiensi kinerja sehingga dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi yang dibutuhkan dalam upaya meningkatkan implementasi SAKIP serta memperbaiki dan / atau meningkatkan capaian kinerja individu maupun organisasi. Rekomendasi-rekomendasi rapat dan upaya tindaklanjutnya agar	Kepala Dinas telah meminta kepada sub koordinator melakukan pendokumentasian pelaksanaan rapat kerja dan kegiatan lainnya melalui notulen rapat dan membuat laporan untuk disampaikan kepada pimpinan / atasan langsung (Notulen rapat terlampir)	Tim Evaluasi SAKIP	Selesai

	didokumentasikan dan dimonitoring pelaksanaannya secara berkala			
	d. Menyusun Laporan / Matrik pelaksanaan tindaklanjut Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat yang berisikan Daftar Rekomendasi, Rencana Aksi Tindaklanjutnya, Penanggungjawab, dan Status / Progres penyelesaian rekomendasi	Kepala Dinas memerintahkan kepada Tim SAKIP supaya menyusun laporan tindak lanjut hasil evaluasi sakip dengan dilengkapi Daftar Rekomendasi, Rencana Aksi Tindaklanjutnya, Penanggungjawab, dan Status / Progres penyelesaian rekomendasi (Matrik Tindak Lanjut LHE SAKIP terlampir)	Tim Evaluasi SAKIP	Selesai
	e. Melakukan analisis yang mendalam / memadai atas dua indikator kinerja tujuan yang belum mencapai target dengan menganalisis faktor-faktor yang mengakibatkan ketidaktercapaian target, serta merumuskan rekomendasi-rekomendasi / penyesuaian aktivitas yang diperlukan agar target ditahun selanjutnya dapat tercapai	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan akan melakukan analisis secara lebih mendalam melalui rapat evaluasi atas dua indikator kinerja tujuan yang belum mencapai target dengan menganalisis faktor-faktor yang mengakibatkan ketidaktercapaian target, serta merumuskan rekomendasi-rekomendasi / penyesuaian aktivitas yang diperlukan agar target ditahun selanjutnya dapat tercapai dengan melibatkan seluruh pimpinan, dan pegawai sampai kepada level pelaksana (Notulen Rapat terlampir)	Tim Evaluasi SAKIP	Selesai

2..Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Dengan Indikator Nilai SAKIP

Hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran dengan indikator nilai SAKIP Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Purbalingga dapat dirinci pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 3.14
Analisis Capaian Kinerja Sasaran dengan Indikator Nilai SAKIP
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023 (%)

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023 (%)
Nilai Sakip Dinarspus	Persen	66,87	69,14	72,41	72,50	73,01	100,70

Tabel analisis capaian kinerja dan sasaran dengan indikator nilai SAKIP Dinarspus menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, khusus untuk target tahun 2023 sebesar 72,50 dapat terealisasi sebesar 73,01 atau 100,70 persen.

3. Capaian Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Akhir RPJMD



Tabel. 3.15

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2022 dan Tahun 2023 Target Kinerja Akhir RPJMD

No	Sasaran	Indikator kinerja sasaran	Satuan	Tahun 2022		Capaian %	Tahun 2023		Capaian %	Kondisi Kinerja Akhir		Prosentase Kinerja RPJMD s 2023
				Target	Realisasi		Target	Realisasi		%	Target Kinerja Akhir RPJMD	
1.	Meningkatkan Implementasi SAKIP DINARSPUS	Nilai SAKIP	Nilai	66,87	72,41	108,28	72,50	73,1	100,82	74	100,82	98,78

Untuk tabel kinerja sasaran, dengan indikator Nilai SAKIP pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 tercapai diatas 100%, nilai SAKIP Dinarspus pada tahun 2023 tercapai 100,82% tetapi capaian lebih tinggi di tahun 2022 yaitu 108,28 % turun 7,46, dengan capaian akhir RPJMD 98,78% katagori “Sangat Tinggi.

Program dan Kegiatan yang menunjang di Sekretariat yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan kegiatan :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

4. TUJUAN 2 : “MENINGKATKAN PENGETAHUAN DAN LITERASI MASYARAKAT”

Secara umum pengertian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM), adalah data tingkat pembangunan literasi masyarakat yang diperoleh dari unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) yang bersumber dari data sekunder dan aspek masyarakat (AM) dalam upaya membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat guna meningkatkan literasi masyarakat. Karakteristik IPLM lebih memfokuskan pada sisi hulu yakni pengembangan dan penguatan kelembagaan dan infrastruktur perpustakaan. Hal inilah yang membedakannya dengan Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) yang lebih memfokuskan pada sisi hilir yakni pengembangan budaya baca, kegemaran membaca, dan literasi masyarakat.

Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) bertujuan untuk mengetahui kondisi semua jenis perpustakaan, baik dari aspek sebaran perpustakaan, koleksi, tenaga perpustakaan, hingga pemustaka yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Purbalingga.

Dalam rangka menjalankan visi, misi, Bupati Purbalingga yang termuat dalam RPJMD 2021- 2026 Kabupaten Purbalingga, dan telah dijabarkan dalam Renstra 2021-2026 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan serta telah diuraikan dalam target RKPD Tahun 2023 dan telah diperjanjikan oleh Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan Bupati Purbalingga melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2023 berupa Tujuan Strategis berupa **Meningkatnya**

Pengetahuan dan Literasi Masyarakat dengan Indikator **INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT (IPLM)** dengan capaian target sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Tahun 2023

Tabel. 3.16

Capaian Kinerja Indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
1	Meningkatnya pengetahuan dan literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	12	12,02	100.16

tabel tersebut dapat diketahui bahwa Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat pada Tahun 2023, dengan target 12 dapat tercapai sebesar 12,02 sehingga capaian indikator kinerja ini sebesar 100,16 %.

Sebagai alat ukur hasil tabel diatas, dihitung berdasarkan Indeks pembangunan literasi masyarakat, pada pengukuran skor IPLM pada level kabupaten/kota adalah tahap pengumpulan data. Adapun data yang dikumpulkan dalam pengukuran IPLM adalah data sekunder, yang biasanya didapat dari publikasi resmi, pangkalan data, atau rekapitulasi data lembaga, dengan rumus rumus pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat:

$$\Sigma = \frac{UPLMi \times 100}{AM}$$

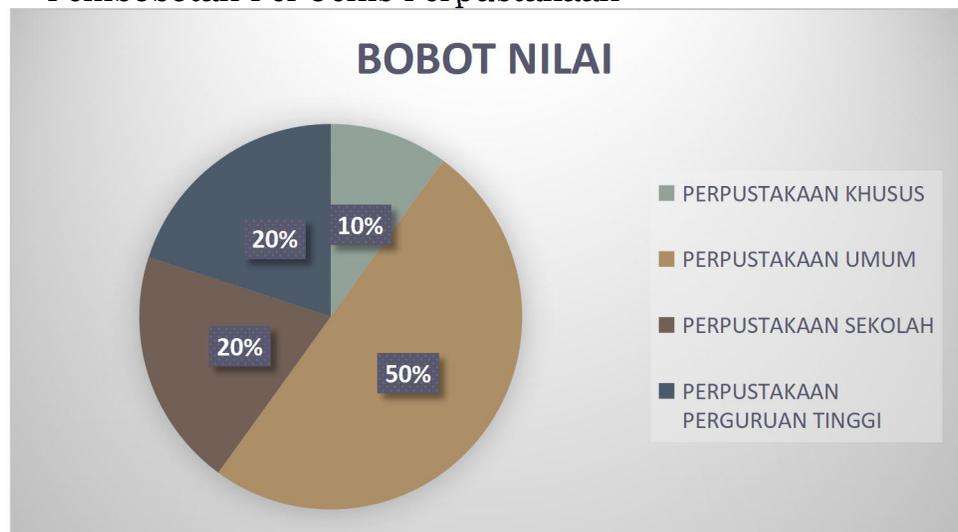
Keterangan:

UPLMi : variabel komponen pembentuk indeks dari Unsur Pembangun Literasi Masyarakat

AM : jumlah populasi sesuai segmentasi berdasarkan lokus/jenis perpustakaan

Rumus ini merupakan kumpulan dari rumus pengukuran rasio dari tujuh (7) komponen Unsur Pembangun Literasi Masyarakat beserta pembagiannya dari komponen Aspek Masyarakat. Selain itu pada setiap pengukuran UPLM terdapat pembobotan pada tiap jenis perpustakaan dengan komposisi sebagai berikut:

Gambar. 3. 1
Pembobotan Per Jenis Perpustakaan



Gambar II.1 - Pembobotan Per Jenis Perpustakaan

Adapun pembobotan per jenis perpustakaan ini diterapkan berdasarkan besarnya cakupan pemustaka yang dilayani oleh tiap perpustakaan tersebut. Perpustakaan umum memiliki porsi bobot terbesar (50%) karena memiliki cakupan layanan pemustaka yang lebih luas dan beragam. Berbeda dengan jenis perpustakaan lainnya, yakni perpustakaan sekolah/madrasah (20%), perpustakaan perguruan tinggi (20%), dan perpustakaan khusus (10% yang memiliki segmentasi pemustaka yang lebih spesifik dan terbatas pada lingkup instansi yang membawahnya).

Tahap pengumpulan data pada level ini dibagi dua komponen, antara lain: komponen Unsur Pembangun Literasi Masyarakat (UPLM) dan komponen Unsur Aspek Masyarakat (AM), dapat diuraikan sebagai berikut :

1. **Pengumpulan Data Pendukung Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM)**

Unsur Pembangun Literasi Masyarakat (UPLM) terdiri atas 7 (tujuh) komponen yaitu:

1. Pemerataan layanan perpustakaan (UPLM1).

Data yang digunakan untuk mengukur komponen ini terdiri atas:

- a. Rasio ketersediaan perpustakaan umum, yakni jumlah ketersediaan unit perpustakaan umum (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan) yang

kemudian dibagi dengan jumlah populasi penduduk provinsi/kabupaten/kota;

- b. Rasio ketersediaan perpustakaan sekolah/madrasah, yakni jumlah ketersediaan unit perpustakaan sekolah/madrasah mulai dari tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK kemudian dibagi dengan jumlah populasi civitas sekolah (jumlah siswa/peserta didik dan guru) di kabupaten/kota. Catatan : perpustakaan sekolah/madrasah dihitung bukan berdasarkan aspek kewenangan pembinaan, melainkan berdasarkan keberadaannya di suatu wilayah sesuai dengan fungsi sebagai perpustakaan pembina;
- c. Rasio ketersediaan perpustakaan perguruan tinggi, yakni jumlah perpustakaan perguruan tinggi (universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi) dibagi dengan jumlah populasi civitas akademika (jumlah mahasiswa dan dosen) di kabupaten/kota;
- d. Rasio ketersediaan perpustakaan khusus, yakni jumlah perpustakaan khusus (instansi pemerintah pusat/daerah dan instansi swasta) yang dibagi dengan jumlah populasi bekerja di wilayah kabupaten/kota

2. Ketercukupan koleksi (UPLM2).

Data yang digunakan untuk mengukur komponen ini (satuan judul) terdiri atas:

- a. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan umum (baik tercetak maupun digital), yakni jumlah koleksi perpustakaan umum dibagi dengan jumlah populasi penduduk provinsi/kabupaten/kota;
- b. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan sekolah/madrasah (baik tercetak maupun digital), yakni jumlah koleksi perpustakaan sekolah dibagi dengan jumlah civitas sekolah di kabupaten/kota. Catatan : koleksi yang dihitung/diukur adalah koleksi buku teks pengayaan (di luar kurikulum sekolah), bukan buku paket pelajaran;
- c. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan perguruan tinggi (baik tercetak maupun digital), yakni jumlah koleksi

perpustakaan perguruan tinggi dibagi dengan jumlah civitas akademika di kabupaten/kota;

d. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan khusus (baik tercetak maupun digital), yakni jumlah koleksi perpustakaan khusus dibagi dengan jumlah civitas akademika di kabupaten/kota;

3. Ketercukupan tenaga perpustakaan (UPLM3);

Rumus yang digunakan untuk mengukur komponen ini terdiri atas:

a. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan umum, yakni jumlah tenaga perpustakaan (pustakawan dan tenaga teknis) dibagi dengan jumlah populasi penduduk provinsi/kabupaten/kota;

b. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan sekolah/madrasah, yakni jumlah tenaga perpustakaan (pustakawan dan tenaga teknis) dibagi dengan jumlah civitas sekolah di kabupaten/kota;

c. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan perguruan tinggi, yakni jumlah tenaga perpustakaan perguruan tinggi (pustakawan dan tenaga teknis) dibagi dengan jumlah civitas akademika di kabupaten/kota;

d. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan khusus, yakni jumlah tenaga perpustakaan (pustakawan dan tenaga teknis) dibagi dengan jumlah populasi bekerja di kabupaten/kota;

4. Tingkat kunjungan masyarakat per hari (UPLM4)

Data yang digunakan untuk mengukur komponen ini terdiri atas:

a. Rasio tingkat kunjungan pemustaka dan pengunjung per hari di perpustakaan umum (secara onsite maupun online), yakni jumlah kunjungan pemustaka dan pengunjung per hari dibagi dengan jumlah populasi penduduk di provinsi/kabupaten/kota;

b. Rasio tingkat kunjungan civitas sekolah per hari di perpustakaan sekolah/madrasah (secara onsite maupun online), yakni jumlah kunjungan civitas sekolah per hari dibagi dengan jumlah civitas sekolah di kabupaten/kota;

- c. Rasio tingkat kunjungan civitas akademika per hari di perpustakaan perguruan tinggi (secara onsite maupun online), yakni jumlah kunjungan civitas akademika per hari dibagi dengan jumlah civitas akademika di kabupaten/kota;
 - d. Rasio tingkat kunjungan karyawan/pegawai per hari di perpustakaan khusus (secara onsite dan online), yakni jumlah kunjungan karyawan/pegawai per hari dibagi dengan jumlah populasi bekerja di kabupaten/kota;
5. Jumlah perpustakaan yang dibina sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (UPLM5);

Data yang digunakan untuk mengukur komponen ini terdiri atas:

- a. Rasio jumlah perpustakaan umum yang dibina berbasis Standar Nasional Perpustakaan (SNP), yakni jumlah perpustakaan umum yang sudah dibina sesuai dengan SNP, sudah memiliki Nomor Pokok Perpustakaan (NPP), baik terakreditasi maupun belum terakreditasi, yang dibagi dengan jumlah total perpustakaan umum yang ada di wilayah provinsi/kabupaten/kota;
 - b. Rasio jumlah perpustakaan sekolah/madrasah berbasis SNP dan/atau memiliki NPP, yakni jumlah perpustakaan sekolah/madrasah yang sudah dibina sesuai dengan SNP, memiliki Nomor Pokok Perpustakaan (NPP), baik terakreditasi maupun belum terakreditasi, yang dibagi dengan jumlah total perpustakaan sekolah/madrasah yang ada di wilayah kabupaten/kota;
 - c. Rasio jumlah perpustakaan perguruan tinggi berbasis SNP dan/atau memiliki NPP, yakni jumlah perpustakaan perguruan tinggi yang dibina sesuai dengan SNP, memiliki Nomor Pokok Perpustakaan (NPP), baik terakreditasi maupun belum terakreditasi, yang dibagi dengan jumlah total perpustakaan tinggi yang ada di wilayah kabupaten/kota;
 - d. Rasio jumlah perpustakaan khusus berbasis SNP dan/atau memiliki NPP, yakni jumlah perpustakaan khusus umum yang dibina sesuai dengan SNP, memiliki Nomor Pokok Perpustakaan (NPP), baik terakreditasi maupun belum terakreditasi, yang dibagi dengan jumlah total perpustakaan khusus yang ada di wilayah kabupaten/kota;
6. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi (UPLM6)

Data yang digunakan untuk mengukur komponen ini terdiri atas:

- a. Rasio jumlah partisipasi masyarakat dalam sosialisasi perpustakaan (secara onsite maupun online), yakni jumlah masyarakat yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi perpustakaan dibagi dengan jumlah populasi penduduk di provinsi/kabupaten/kota;
 - b. Rasio jumlah partisipasi civitas sekolah dalam sosialisasi perpustakaan (secara onsite maupun online), yakni jumlah civitas sekolah yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi perpustakaan dibagi dengan jumlah populasi penduduk di kabupaten/kota;
 - c. Rasio jumlah partisipasi civitas akademika dalam sosialisasi perpustakaan (secara onsite maupun online), yakni jumlah partisipasi civitas akademika yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi perpustakaan dibagi dengan jumlah populasi penduduk di kabupaten/kota;
 - d. Rasio jumlah partisipasi karyawan/pegawai dalam sosialisasi perpustakaan (secara onsite maupun online), yakni jumlah partisipasi karyawan/pegawai yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi perpustakaan dibagi dengan jumlah populasi penduduk di kabupaten/kota;
7. Jumlah anggota perpustakaan / Pemustaka (UPLM7)

Data yang digunakan untuk mengukur komponen ini terdiri atas:

- a. Rasio jumlah anggota perpustakaan umum (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan), yakni jumlah anggota perpustakaan umum dibagi dengan jumlah populasi penduduk provinsi/kabupaten/kota;
- b. Rasio jumlah anggota perpustakaan sekolah/madrasah, yakni jumlah anggota perpustakaan sekolah/madrasah dibagi dengan jumlah civitas sekolah yang ada di kabupaten/kota;
- c. Rasio jumlah anggota perpustakaan perguruan tinggi, yakni jumlah anggota perpustakaan perguruan tinggi dibagi dengan jumlah civitas akademika yang ada di kabupaten/kota;
- d.** Rasio jumlah anggota perpustakaan khusus, yakni jumlah anggota perpustakaan khusus dibagi dengan jumlah populasi penduduk bekerja yang ada di kabupaten/kota;

2. Pengumpulan Data Unsur Aspek Masyarakat (AM).

Berbeda dengan konsep pada pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, komponen Aspek Masyarakat (AM) dalam pedoman ini disesuaikan berdasarkan lokus atau Data AM yang dikumpulkan. Berikut adalah sumber data resmi yang digunakan sebagai komponen Aspek Masyarakat dalam penerapan rumus Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat:

1. Populasi Penduduk Data yang digunakan, Jumlah Penduduk, Luas Wilayah Kabupaten Purbalingga, Kepadatan Penduduk dan Angka Koreksi Berdasarkan Tingkat Kepadatan, data ini mengacu pada data resmi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sumber data yang digunakan untuk jumlah populasi penduduk.

2. Populasi Civitas Sekolah

Data yang digunakan pada populasi civitas sekolah adalah data populasi jumlah siswa dan guru, data jumlah siswa dan guru yang digunakan di sini adalah data siswa dan guru pada SD, SMP, SMA dan SMK. Sumber data resmi yang digunakan pada komponen ini adalah laman web resmi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan EMIS Pendidikan Islam dari Kementerian Agama.

3. Populasi Civitas Akademika

Data yang digunakan pada civitas akademika adalah data populasi jumlah mahasiswa dan dosen (tenaga pendidik). Sumber data resmi yang dapat digunakan pada komponen ini adalah publikasi tahunan BPS level provinsi atau BPS level kabupaten/kota.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Statistik Kabupaten Purbalingga dan Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga maka diketahui Data Aspek Masyarakat (AM) Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:

a. Jumlah Penduduk Kab. Purbalingga : **1.007.794 jiwa**

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga pada Tahun 2023 diperoleh data kependudukan dengan jumlah penduduk Kab. Purbalingga sebanyak

1.007.794 jiwa yang terdiri dari 509.854 laki-laki dan 497.940 perempuan

b. Luas Kabupaten Purbalingga : **777.6 Km²**

Kabupaten Purbalingga berada di bagian tengah Provinsi Jawa Tengah dengan batas di sebelah timur Kabupaten Banjarnegara, sebelah utara Kabupaten Pemalang, sebelah selatan dan barat adalah Kabupaten Banyumas

c. Tingkat Kepadatan Penduduk : **1.296 jiwa /Km²**

Tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Purbalingga dihitung berdasarkan jumlah penduduk dibagi dengan luas wilayah Kabupaten Purbalingga dengan satuan jiwa / Km². Berdasarkan data yang diperoleh bahwa luas wilayah kabupaten Purbalingga sebesar 771.6 Km² sedangkan jumlah penduduk sebesar 1.007.794 jiwa

d. Angka Pembagi Ratio Kabupaten : **22.000**

Angka pembagi rasio kabupaten ini berdasarkan pada acuan bahwa jumlah penduduk antara 1 juta jiwa sampai dengan 1,1 juta jiwa menggunakan ratio pembagi sebesar 22.000.

e. Angka Koreksi Berdasarkan Tingkat Kepadatan : **1.5**

Angka koreksi berdasarkan tingkat kepadatan mengacu kepada asumsi bahwa jumlah kepadatan penduduk lebih dari 10.000 jiwa maka angka koreksi kepadatannya sebesar 1,5

f. Jumlah Civitas Sekolah Dasar (SD)/MI : **73.083 orang**

Jumlah civitas SD/MI adalah dihitung berdasarkan jumlah siswa sekolah dasar dan jumlah guru Sekolah Dasar/MI, sehingga diperoleh data 66.564 orang + 6.519 orang

g. Jumlah civitas SMP/MTs : **34.633 orang**

Yakni jumlah siswa SMP Negeri dan Swasta di Kabupaten Purbalingga yang tersebar di 18 Kecamatan pada Tahun 2023 berjumlah 32.802 siswa dan terdiri dari 16.780 laki laki dan 16.022 siswa perempuan serta ditambah dengan jumlah guru SMP/MTs sebanyak 1.831 orang.

h. Jumlah civitas SMA/SMK/MA : **35.079 orang**

Yakni terdiri dari 4.381 siswa laki laki dan 6.906 siswa perempuan yang tersebar di 18 kecamatan di SMA, dan di SMK terdiri dari 11.875 siswa laki laki dan 10.204 siswa perempuan dan tambah jumlah guru sebanyak 1.713 orang

i. Jumlah Civitas Akademika : **1500 orang**

Populasi mahasiswa ini dihitung berdasarkan jumlah mahasiswa yang terdapat di Universitas Perwira Purbalingga sebanyak 400 mahasiswa dan 34 dosen, di Institut Teknologi dan Bisnis Muhamadiyah Purbalingga sebanyak 42 mahasiswa dengan 15 dosen, dan di Universitas Jend. Soedirman Purwokerto Fakultas Teknik yang berlokasi di Desa Blater Kalimanah sebanyak 952 orang dengan 57 dosen.

j. Populasi Masyarakat Bekerja : **6964 orang**

Berdasarkan sumber data dari BPS 2023 bahwa jumlah penduduk yang bekerja dengan status PNS adalah sebanyak 6964 orang yang bekerja di Instansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Diketahui juga Data Unsur Pembangun Literasi Masyarakat (UPLM) Kabupaten Purbalingga sebagai berikut:

Tabel. 3.17
Data Unsur Pembangun Literasi Masyarakat (UPLM)

NO	INDIKATOR IPLM	PERPUSTAKAAN UMUM			PERPUSTAKAAN SEKOLAH			PERPUSTAKAAN PT	PERPUSTAKAAN KHUSUS	JUMLAH
		KAB	KEC	DESA	SD	SMP/MTs	SMA/K/MA			
1	Pemerataan Layanan Perpustakaan	1	0	166	472	77	61	3	13	793
2	Ketercukupan Koleksi	33.743	0	14.374	23.600	17.455	14.495	1.050	1.350	106.067
3	Ketercukupan Tenaga Perpustakaan	20	0	166	472	77	61	3	13	812
4	Tingkat Kunjungan Masyarakat/Hari	355	0	9470	22500	17455	14495	425	550	65.250
5	Jumlah Perpustakaan yang dibina sesuai SNP	1	0	18	72	63	43	0	1	198
6	Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi	35.000	0	12.500	35.000	16.000	17.000	1.200	950	117.650
7	Anggota Perpustakaan	34.643	0	12.500	26.150	36.802	35.365	350	150	145.960

(Sumber Data Bidang Perpustakaan Tahun 2023)

Dengan demikian dari table dan data diatas pada setiap penghitungan UPLM1 hingga UPLM7 pada tiap jenis/unsur berlaku penghitungan sebagai berikut :

1. Data UPLM 1 (Pemerataan Perpustakaan)

- | | |
|---|------------|
| a. Jumlah perpustakaan umum kabupaten | : 1 unit |
| b. Jumlah perpustakaan kecamatan | : 0 |
| c. Jumlah perpustakaan desa | : 166 unit |
| d. Jumlah perpustakaan SD/MI | : 472 unit |
| e. Jumlah perpustakaan SMP/MTs | : 77 unit |
| f. Jumlah perpustakaan SMA/SMK/MA | : 61 unit |
| g. Jumlah perpustakaan perguruan tinggi | : 3 unit |
| h. Jumlah perpustakaan kusus | : 13 unit |

Berdasarkan data tersebut maka dapat diperoleh perhitungan sebagai berikut :

a. Perpustakaan Umum:

- Perpustakaan Kabupaten/Kota:

Rumus :

Jumlah Unit Perpustakaan Kabupaten dibagi Angka Pembagi Ratio Kabupaten/Kota Dengan demikian penghitungannya menjadi seperti ini: $1 / 22.000 = 0,000045$

- Perpustakaan Kecamatan

Rumus :

Jumlah Unit Perpustakaan Kecamatan dibagi Jumlah Populasi Kabupaten/Kota Maka penghitungannya menjadi : $0 / 1.007.794 = 0$

- Perpustakaan Desa

Rumus :

Jumlah Unit Perpustakaan Desa/Kelurahan dibagi Jumlah Populasi Kabupaten/Kota Maka penghitungannya menjadi seperti ini: $166 / 1.007.794 = 0,000165$

Maka jumlah ratio ketersediaan layanan perpustakaan untuk perpustakaan umumnya adalah: $0,000045 + 0 + 0,000165 = 0,000210$

b. Perpustakaan Sekolah/Madrasah

- Perpustakaan SD/MI:

Rumus :

Jumlah Unit Perpustakaan SD/MI dibagi Jumlah Civitas SD/MI
Maka penghitungannya menjadi :

$$472 / 73.083 = 0,006458$$

- Perpustakaan SMP/MTs:

Rumus :

Jumlah Unit Perpustakaan SMP/MTs dibagi Jumlah Civitas SMP/MTs Maka penghitungannya menjadi : $77 / 34.633 = 0,002223$

- Perpustakaan SMA/K/MA:

Rumus :

Jumlah Unit Perpustakaan SMA/SMK/MA dibagi Jumlah Civitas SMA/K/MA Maka penghitungannya menjadi : $61 / 35.079 = 0,001739$

Maka jumlah ratio ketersediaan layanan perpustakaan untuk perpustakaan sekolah/madrasah adalah: $0,006458 + 0,002223 + 0,001739 = 0,010421$

- Perpustakaan Perguruan Tinggi :

Rumus :

Jumlah Unit Perpustakaan Perguruan Tinggi dibagi Jumlah Civitas Akademika Maka penghitungannya menjadi seperti ini: $3 / 1500 = 0,002000$

- Perpustakaan Khusus:

Rumus :

Jumlah Unit Perpustakaan Khusus dibagi Jumlah Pegawai/Karyawan Maka penghitungannya menjadi seperti ini: $13 / 6964 = 0,001867$

Setelah angka ratio per jenis perpustakaan didapatkan, selanjutnya kita akan mengukur UPLM1 dengan rumus sebagai berikut:

$$50\% \left[\frac{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN UMUM}}{\text{JUMLAH POPULASI PENDUDUK}} \right] + 20\% \left[\frac{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN SEKOLAH}}{\text{JUMLAH CIVITAS SEKOLAH}} \right] + 20\% \left[\frac{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN PERG. TINGGI}}{\text{JUMLAH CIVITAS AKADEMIKA}} \right] + 10\% \left[\frac{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN KHUSUS}}{\text{JUMLAH POPULASI PENDUDUK BEKERJA}} \right] \times \text{ANGKA KOREKSI BERDASARKAN TINGKAT KEPADATAN}$$

$$: (50\% (0,000210) + 20\% (0,010421) + 20\% (0,002000) + 10\% (0,001867)) \times 1,5 = 0,004164$$

Maka diperoleh angka rasio ketersediaan layanan perpustakaan untuk UPLM1 di Kabupaten Purbalingga sebesar : **0,004164**

2. Data UPLM 2 (Ketercukupan Koleksi)

- a. Jumlah koleksi perpust kabupaten : 33.743 judul
- b. Jumlah koleksi perpust kecamatan : 0
- c. Jumlah koleksi perpust desa/kel : 14374 judul
- d. Jumlah koleksi perpust SD/MI : 23600 judul
- e. Jumlah koleksi perpust SMP/MTs : 17455 judul
- f. Jumlah koleksi perpust SMA/SMK/MA : 14495 judul
- g. Jumlah koleksi perpust Perguruan Tinggi : 1050 judul
- h. Jumlah koleksi perpust khusus : 1350 judul

Berdasarkan data tersebut maka dapat diperoleh perhitungan sebagai berikut :

a. Perpustakaan Umum

- Perpustakaan Kabupaten/Kota :

Rumus :

Jumlah Koleksi Perpustakaan Kabupaten/Kota dibagi Jumlah Populasi Kabupaten/Kota Dengan demikian penghitungannya menjadi seperti ini: $33.743 / 1.007.794 = 0,033482$

- Perpustakaan Kecamatan

Rumus :

Jumlah Koleksi Perpustakaan Kecamatan dibagi Jumlah Populasi Kabupaten /Kota sehingga penghitungannya menjadi : $0 / 1.007.794 = 0$

- Perpustakaan Desa / Kelurahan

Rumus :

Jumlah Koleksi Perpustakaan Desa/Kelurahan dibagi Jumlah Populasi Kabupaten/Kota Maka penghitungannya menjadi seperti ini: $14.374 / 1.007.794 = 0,014263$

Maka jumlah ratio ketercukupan koleksi untuk perpustakaan umumnya adalah: $0,033482 + 0 + 0,014263 = 0,047745$

b. Perpustakaan Sekolah

- Perpustakaan SD/MI:

Rumus :

Jumlah Koleksi Perpustakaan SD/MI dibagi Jumlah Civitas SD/MI, maka penghitungannya menjadi : $23600 / (73.083) = 0,322921$

- Perpustakaan SMP/MTs :

Rumus :

Jumlah Koleksi Perpustakaan SMP/MTs dibagi Jumlah Civitas SMP/MTs, maka penghitungannya menjadi seperti ini : $12,300 / (34.633) = 0,355153$

- Perpustakaan SMA/SMK/MA :

Rumus :

Jumlah Koleksi Perpustakaan SMA/K/MA dibagi Jumlah Civitas SMA/K/MA Maka penghitungannya menjadi seperti ini: $7970 / (35.079) = 0,227201$

Maka jumlah ratio ketercukupan koleksi untuk perpustakaan sekolah/madrasah adalah: $0,322921 + 0,355153 + 0,227201 = 0,905275$

- Perpustakaan Perguruan Tinggi

Rumus :

Jumlah koleksi Perpustakaan Perguruan Tinggi dibagi Jumlah Civitas Akademika, maka penghitungannya menjadi seperti ini : $1050 / 1500 = 0,700000$

- Perpustakaan Khusus

Rumus :

Jumlah Koleksi Perpustakaan Khusus dibagi Jumlah Pegawai/Karyawan maka penghitungannya menjadi seperti ini: $1350 / 6964 = 0,193854$.

Berdasarkan rumus perhitungan UPLM2 maka diperoleh rincian hitungan sebagai berikut :

$$50\% \left[\frac{\text{JUMLAH KOLEKSI PERPUSTAKAAN UMUM}}{\text{JUMLAH POPULASI PENDUDUK}} \right] + 20\% \left[\frac{\text{JUMLAH KOLEKSI PERPUSTAKAAN SEKOLAH}}{\text{JUMLAH CIVITAS SEKOLAH}} \right] + 20\% \left[\frac{\text{JUMLAH KOLEKSI PERPUSTAKAAN PERG. TINGGI}}{\text{JUMLAH CIVITAS AKADEMIKA}} \right] + 10\% \left[\frac{\text{JUMLAH KOLEKSI PERPUSTAKAAN KHUSUS}}{\text{JUMLAH POPULASI PENDUDUK BEKERJA}} \right] \times \text{ANGKA KOREKSI BERDASARKAN TINGKAT KEPADATAN}$$

$$: [50\% (0,047745) + 20\% (0,905275) + 20\% (0,700000) + 10\% (0,193854)] \times 1,5 = 0,546469$$

Maka didapatlah angka ratio ketercukupan koleksi untuk UPLM2 di Kabupaten Purbalingga sebesar **0,546469**.

3. Data UPLM 3 (Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan)

- | | |
|--------------------------------|-------------|
| a. Perpustakaan Umum Kabupaten | : 20 orang |
| b. Perpustakaan Kecamatan | : 0 orang |
| c. Perpustakaan Desa/Kelurahan | : 166 orang |
| d. Perpustakaan SD/MI | : 472 orang |
| e. Perpustakaan SMP/MTs | : 77 orang |
| f. Perpustakaan SMA/SMK/MA | : 61 orang |

- g. Perpustakaan Perguruan Tinggi : 3 orang
 h. Perpustakaan Kusus : 13 orang

Berdasarkan data tersebut maka dapat diperoleh perhitungan sebagai berikut :

a. Perpustakaan Umum

- Perpustakaan Umum Kabupaten

Rumus :

Jumlah Tenaga Perpustakaan Kabupaten/Kota dibagi Jumlah Populasi Kabupaten/Kota, dengan demikian penghitungannya menjadi : $20 / 1.007.794$
 $= 0,000020$

- Perpustakaan Kecamatan

Rumus :

Jumlah Tenaga Perpustakaan Kecamatan dibagi Jumlah Populasi Kabupaten/Kota. Maka penghitungannya menjadi : $0 / 1.007.784$
 $= 0$

- Perpustakaan Desa Kelurahan

Rumus :

Jumlah Tenaga Perpustakaan Desa/Kelurahan dibagi Jumlah Populasi Kabupaten/Kota. Maka penghitungannya menjadi : $166 / 1.007.794 = 0,000165$

Maka jumlah ratio ketercukupan tenaga perpustakaan untuk perpustakaan umum adalah: $0,000020 + 0 + 0,000165 = 0,000185$

b. Perpustakaan Sekolah / Madrasah

- Perpustakaan SD/MI:

Rumus :

Jumlah Tenaga Perpustakaan SD/MI dibagi Jumlah Civitas SD/MI
 Maka penghitungannya menjadi seperti ini: $472 / (73.083) = 0,006458$

- Perpustakaan SMP/MTs :

Rumus :

Jumlah Tenaga Perpustakaan SMP/MTs dibagi Jumlah Civitas SMP/MTs. Maka penghitungannya menjadi ini: $77 / (34.633) = 0,002223$

- Perpustakaan SMA/SML/MA :

Rumus :

Jumlah Tenaga Perpustakaan SMA/K/MA dibagi Jumlah Civitas SMA/K/MA. Maka penghitungannya menjadi : $61 / (35.079) = 0,001739$

Maka jumlah ratio ketercukupan tenaga perpustakaan untuk perpustakaan sekolah/madrasah adalah: $0,006458 + 0,002223 + 0,001739 = 0,010421$.

c. Perpustakaan Perguruan Tinggi :

Rumus : Jumlah Tenaga Perpustakaan Perguruan Tinggi dibagi Jumlah Civitas Akademika Maka penghitungannya menjadi seperti ini: $3 / 1500 = 0,002000$

d. Perpustakaan Khusus :

Rumus : Jumlah tenaga Perpustakaan Khusus dibagi Jumlah Pegawai/Karyawan Maka penghitungannya menjadi seperti ini: $13 / 6964 = 0,001867$

Setelah angka ratio per jenis perpustakaan didapatkan, selanjutnya kita akan mengukur UPLM3 dengan rumus sebagai berikut:

$$50\% \left[\frac{\text{JUMLAH TENAGA PERPUSTAKAAN UMUM}}{\text{JUMLAH POPULASI PENDUDUK}} \right] + 20\% \left[\frac{\text{JUMLAH TENAGA PERPUSTAKAAN SEKOLAH}}{\text{JUMLAH CIVITAS SEKOLAH}} \right] + 20\% \left[\frac{\text{JUMLAH TENAGA PERPUSTAKAAN PERG. TINGGI}}{\text{JUMLAH CIVITAS AKADEMIKA}} \right] + 10\% \left[\frac{\text{JUMLAH TENAGA PERPUSTAKAAN KHUSUS}}{\text{JUMLAH POPULASI PENDUDUK BEKERJA}} \right] \times \text{ANGKA KOREKSI BERDASARKAN TINGKAT KEPADATAN}$$

$$= (50\% (0,000185) + 20 \% (0,010421) + 20 \% (0,002000) + 10 \% (0,001867)) 1,5 = 0,004145$$

Maka didapatlah angka ratio ketercukupan tenaga perpustakaan untuk UPLM3 di Kabupaten Purbalingga sebesar **0,004145**

4. Data UPLM 4 (Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan –Perhari)

- a. Perpustakaan Kabupaten : 355 orang
- b. Perpustakaan Kecamatan : 0 orang
- c. Perpustakaan Desa/Kel : 9470 orang
- d. Perpustakaan SD/MI : 5625 orang
- e. Perpustakaan SMP/MTs : 22500 orang
- f. Perpustakaan SMA/K/A : 17455 orang
- g. Perpustakaan Perguruan Tinggi : 425 orang
- h. Perpustakaan Kusus : 550 orang

Berdasarkan data tersebut maka dapat diperoleh perhitungan sebagai berikut :

- a. Perpustakaan Umum:
 - Perpustakaan Kabupaten/Kota:

Rumus : Jumlah Kunjungan per Hari Perpustakaan Kabupaten/Kota dibagi Jumlah Populasi Kabupaten/Kota. Dengan demikian penghitungannya menjadi seperti ini: $355 / 22.000 = 0,016136$

- Perpustakaan Kecamatan :

Rumus :

Jumlah Kunjungan per Hari Perpustakaan Kecamatan dibagi Jumlah Populasi Kabupaten/Kota, maka diperoleh perhitungan sebagai berikut : $0 / 1.007.794 = 0$

- Perpustakaan Desa/Kelurahan :

Rumus :

Jumlah Kunjungan per Hari Perpustakaan Desa/Kelurahan dibagi Jumlah Populasi Kabupaten/Kota, maka diperoleh perhitungan sebagai berikut : $9470 / 1.007.794 = 0,009397$

Maka jumlah ratio kunjungan masyarakat per hari untuk perpustakaan umumnya adalah: $0,016136 + 0 + 0,009397 = 0,025533$

- b. Perpustakaan Sekolah/Madrasah :

- Perpustakaan Sekolah Dasar/MI

Rumus :

Jumlah Kunjungan per Hari Perpustakaan SD/MI dibagi Jumlah Civitas SD/MI Maka penghitungannya menjadi seperti ini: $22500 / (73.083) = 0,307869$

- Perpustakaan SMP/MTs :

Rumus :

Jumlah Kunjungan per Hari Perpustakaan SMP/MTs dibagi Jumlah Civitas SMP/MTs Maka penghitungannya menjadi : $17455 / (34.633) = 0,503999$

- Perpustakaan SMA/SMK/MA :

Rumus :

Jumlah Kunjungan per Hari Perpustakaan SMA/K/MA dibagi Jumlah Civitas SMA/K/MA. Maka diperoleh perhitungan sebagai berikut : $14495 / (35.079) = 0,413210$

Maka jumlah ratio kunjungan civitas sekolah per hari untuk perpustakaan sekolah/madrasah adalah: $0,307869 + 0,503999 + 0,413210 = 1,225078$

- c. Perpustakaan Perguruan Tinggi :

Rumus :

Jumlah Kunjungan per Hari Perpustakaan Perguruan Tinggi dibagi Jumlah Civitas Akademika. Maka penghitungannya menjadi : $425 / 1500 = 0,283333$

- Perpustakaan Khusus :

Rumus :

Jumlah Kunjungan per Hari Perpustakaan Khusus dibagi Jumlah Pegawai / Karyawan. Maka penghitungannya menjadi seperti ini: $550 / 6964 = 0,078978$

Setelah angka ratio per jenis perpustakaan didapatkan, selanjutnya kita akan mengukur UPLM4 dengan rumus sebagai berikut:

$$50\% \left[\frac{\text{Jumlah Kunjungan Perpustakaan Umum}}{\text{Jumlah Populasi Penduduk}} \right] + 20\% \left[\frac{\text{Jumlah Kunjungan Perpustakaan Sekolah}}{\text{Jumlah Civitas Sekolah}} \right] + 20\% \left[\frac{\text{Jumlah Kunjungan Perpustakaan Perg. Tinggi}}{\text{Jumlah Civitas Akademika}} \right] + 10\% \left[\frac{\text{Jumlah Kunjungan Perpustakaan Khusus}}{\text{Jumlah Populasi Penduduk Bekerja}} \right] \times \text{Angka Koreksi Berdasarkan Tingkat Kepadatan}$$

$$= (50\% (0,0255533) + 20 \% (1,225078) + 20 \% (0,283333) + 10 \% (0,078978)) 1,5 = 0,483520$$

Maka didapatlah angka ratio ketercukupan tenaga perpustakaan untuk UPLM4 di Kabupaten Purbalingga sebesar **0,483520**

5. Data UPLM 5 (Perpustakaan yang di bina sesuai SNP)

- Perpustakaan Kabupaten : 1 orang
- Perpustakaan Kecamatan : 0 orang
- Perpustakaan Desa/Kel : 18 orang
- Perpustakaan SD/MI : 72 orang
- Perpustakaan SMP/MTs : 63 orang
- Perpustakaan SMA/K/A : 47 orang
- Perpustakaan Perguruan Tinggi : 0 orang
- Perpustakaan Kusus : 1 orang

Berdasarkan data tersebut maka dapat diperoleh perhitungan sebagai berikut :

- Perpustakaan Umum :

- Perpustakaan Kabupaten/Kota:

Rumus :

Jumlah Unit Perpustakaan Kabupaten/Kota yang dibina Sesuai Standar Perpustakaan Nasional dibagi Jumlah Unit Perpustakaan Kabupaten/Kota. Dengan demikian penghitungannya menjadi : $1 / 1 = 1,000000$

- Perpustakaan Kecamatan:

Rumus : Jumlah Unit Perpustakaan Kecamatan yang Dibina Sesuai Standar dibagi Jumlah Unit Perpustakaan Kecamatan. Maka penghitungannya menjadi seperti ini: $0 / 0 = 0,000000$

- Perpustakaan Desa/Kelurahan:

Rumus : Jumlah Unit Perpustakaan Desa/Kel yang Dibina Sesuai Standar Nasional dibagi Jumlah Unit Perpustakaan Desa/Kel Maka penghitungannya menjadi seperti ini: $18 / 166 = 0,108434$

Maka jumlah ratio perpustakaan yang dibina sesuai standar untuk perpustakaan umumnya adalah: $1 + 0 + 0,108434 = 1,108434$

b. Perpustakaan Sekolah / Madrasah :

- Perpustakaan SD/MI:

Rumus :

Jumlah Unit Perpustakaan SD/MI yang Dibina Sesuai Standar dibagi Jumlah Unit Perpustakaan SD/MI Maka penghitungannya menjadi seperti ini: $72/472 = 0,152542$

- Perpustakaan SMP/MTs:

Rumus :

Jumlah Unit Perpustakaan SMP/MTs yang Dibina Sesuai Standar dibagi Jumlah Unit Perpustakaan SMP/MTs Maka penghitungannya menjadi seperti ini: $63 / 77 = 0,818182$

- Perpustakaan SMA/K/MA:

Rumus : Jumlah Unit Perpustakaan SMA/K/MA yang Dibina Sesuai Standar dibagi Jumlah Unit Perpustakaan SMA/K/MA Maka penghitungannya menjadi seperti ini: $47 / 61 = 0,770492$

Maka jumlah ratio perpustakaan yang dibina sesuai standar untuk perpustakaan sekolah/madrasah adalah: $0,152542 + 0,818182 + 0,770492 = 0,741216$

c. Perpustakaan Perguruan Tinggi :

Rumus : Jumlah Unit Perpustakaan Perg. Tinggi yang Dibina Sesuai Standar dibagi Jumlah Unit Perpustakaan Perg. Tinggi Maka penghitungannya menjadi seperti ini: $0 / 3 = 0$

d. Perpustakaan Khusus

Rumus : Jumlah Unit Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Standar dibagi Jumlah Unit Perpustakaan Khusus. Maka penghitungannya menjadi : $1 / 13 = 0,076923$

Setelah angka ratio per jenis perpustakaan didapatkan, selanjutnya kita akan mengukur UPLM5 dengan rumus sebagai berikut:

$$50\% \left[\frac{\text{JUNLAH UNIT PERPUSTAKAAN UMUM YANG DIBINA SESUAI STANDAR}}{\text{JUNLAH UNIT PERPUSTAKAAN UMUM}} \right] + 20\% \left[\frac{\text{JUNLAH UNIT PERPUSTAKAAN SEKOLAH YANG DIBINA SESUAI STANDAR}}{\text{JUNLAH UNIT PERPUSTAKAAN SEKOLAH}} \right] + 20\% \left[\frac{\text{JUNLAH UNIT PERPUSTAKAAN PERG. TINGGI YANG DIBINA SESUAI STANDAR}}{\text{JUNLAH UNIT PERPUSTAKAAN PERG. TINGGI}} \right] + 10\% \left[\frac{\text{JUNLAH UNIT PERPUSTAKAAN KHUSUS YANG DIBINA SESUAI STANDAR}}{\text{JUNLAH UNIT PERPUSTAKAAN KHUSUS}} \right] \times \text{ANGKA KOREKSI BERDASARKAN TINGKAT KEPADATAN}$$

$$= (50\% (1,108434) + 20 \% (0,741216) + 20 \% (0) + 10 \% (0,076923)) 1,5 = 1,365229$$

Maka didapatlah angka ratio perpustakaan yang dibina sesuai standar perpustakaan untuk UPLM5 di Kabupaten Purbalingga sebesar **1,365229**

6. Data UPLM 6 (Keterlibatan Masyarakat dalam Sosialisasi Perpustakaan)

- a. Perpustakaan Kabupaten : 35000 orang
- b. Perpustakaan Kecamatan : 0 orang
- c. Perpustakaan Desa/Kel : 12500 orang
- d. Perpustakaan SD/MI : 35000 orang
- e. Perpustakaan SMP/MTs : 16000 orang
- f. Perpustakaan SMA/K/A : 17000 orang
- g. Perpustakaan Perguruan Tinggi : 1200 orang
- h. Perpustakaan Kusus : 950 orang

Berdasarkan data tersebut maka dapat diperoleh perhitungan sebagai berikut :

a. Perpustakaan Umum:

- Perpustakaan Kabupaten Kota

Rumus : Jumlah Keterlibatan Masyarakat dlm Sosialisasi Perp.

Kab/Kota dibagi Jumlah Populasi Kabupaten/Kota Dengan demikian penghitungannya menjadi seperti ini: $35000 / 1.007.794 = 0,034729$

- Perpustakaan Kecamatan

Rumus : Jml. Keterlibatan Masyarakat dlm Sosialisasi Perp.

Kecamatan dibagi Jumlah Populasi Kabupaten/Kota Maka penghitungannya menjadi seperti ini: $0 / 1.007.794 = 0$

- Perpustakaan Desa

Rumus : Jumlah Keterlibatan Masyarakat dalam Sosialisasi Perpustakaan Desa/Kelurahan dibagi Jumlah Populasi Kabupaten/Kota. Maka penghitungannya menjadi : $12500 / 1.007.794 = 0,012403$

Maka jumlah ratio keterlibatan masyarakat untuk perpustakaan umumnya adalah: $0,034729 + 0 + 0,012403 = 0,047133$

b. Perpustakaan Sekolah/Madrasah

- Perpustakaan SD/Madrasah

Rumus : Jumlah Keterlibatan Masyarakat dlm Sosialisasi Perpustakaan SD/MI dibagi Jumlah Populasi Civitas Akademika Sekolah Dasar, maka penghitungannya menjadi seperti ini: $35.000 / 73.083 = 0,478908$

- Perpustakaan SMP/MTs

Rumus : Jumlah Keterlibatan Masyarakat dalam Sosialisasi Perp. SMP/MTs dibagi Jumlah Civitas akademika SMP. Maka penghitungannya menjadi seperti ini: $16000 / 34.633 = 0,461987$

- Perpustakaan SMA/SMK/MA :

Rumus : Jumlah keterlibatan masyarakat dalam Sosialisasi Perp. SMA/K/MA dibagi Jumlah Civitas Akademika Sekolah SMA/SMK/MA. Maka penghitungannya menjadi seperti ini: $17000 / 35.079 = 0,484620$

Maka jumlah ratio civitas sekolah yang terlibat dalam sosialisasi perpustakaan untuk perpustakaan sekolah/madrasah adalah: $0,478908 + 0,034729 + 0,484620 = 1,425515$

- c. Perpustakaan Perguruan Tinggi

Rumus :

Jumlah Civitas Akademika yang terlibat dalam sosialisasi Perp. Perguruan Tinggi dibagi Jumlah Civitas Akademika . Maka penghitungannya menjadi seperti ini: $1200 / 1.500 = 0,800000$

- d. Perpustakaan Khusus

Rumus : Jumlah Karyawan/pegawai yang terlibat dalam Sosialisasi kegiatan perpustakaan khusus dibagi Jumlah Populasi Penduduk

Maka penghitungannya menjadi seperti ini: $950 / 6964 = 0,136416$

Setelah angka ratio per jenis perpustakaan didapatkan, selanjutnya kita akan mengukur UPLM6 dengan rumus sebagai berikut:

$$50\% \left[\frac{\text{JUMLAH MASYARAKAT YANG TERLIBAT DALAM KEGIATAN SOSIALISASI PERPUSTAKAAN UMUM}}{\text{JUMLAH POPULASI PENDUDUK}} \right] + 20\% \left[\frac{\text{JUMLAH CIVITAS SEKOLAH YANG TERLIBAT DALAM KEGIATAN SOSIALISASI PERPUSTAKAAN SEKOLAH}}{\text{JUMLAH POPULASI PENDUDUK}} \right] + 20\% \left[\frac{\text{JUMLAH CIVITAS AKADEMIKA YANG TERLIBAT DALAM KEGIATAN SOSIALISASI PERPUSTAKAAN PERG. TINGGI}}{\text{JUMLAH POPULASI PENDUDUK}} \right] + 10\% \left[\frac{\text{JUMLAH KARYAWAN YANG TERLIBAT DALAM KEGIATAN SOSIALISASI PERPUSTAKAAN KHUSUS}}{\text{JUMLAH POPULASI PENDUDUK}} \right] \times \text{ANGKA KOREKSI BERDASARKAN TINGKAT KEPADATAN}$$

$$= (50\% (0,047133) + 20 \% (1,425515) + 20 \% (0,800000) + 10 \% (0,136416)) 1,5 = 0,723466$$

Maka didapatlah angka ratio masyarakat yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi perpustakaan untuk UPLM6 di Kabupaten Purbalingga sebesar **0,723466**

7. Data UPLM 7 (Pemustaka yg terdaftar di Perpustakaan)

- a. Perpustakaan Kabupaten : 34.463 orang
- b. Perpustakaan Kecamatan : 0 orang

- c. Perpustakaan Desa/Kel : 12.500 orang
- d. Perpustakaan SD/MI : 26.150 orang
- e. Perpustakaan SMP/MTs : 36.802 orang
- f. Perpustakaan SMA/K/A : 35.365 orang
- g. Perpustakaan Perguruan Tinggi : 350 orang
- h. Perpustakaan Kusus : 150 orang

Berdasarkan data tersebut maka dapat diperoleh perhitungan sebagai berikut :

a. Perpustakaan Umum:

- Perpustakaan Kabupaten/Kota:

Rumus :

Jumlah Pemustaka/ anggota perpustakaan Kabupaten/Kota dibagi
Jumlah Populasi Kabupaten/Kota.

$$: 34.643 / 1.007.794 = 0,034375$$

- Perpustakaan Kecamatan:

Rumus :

Jumlah Pemustaka/anggota Perpustakaan Kecamatan dibagi Jumlah
Populasi Kabupaten/Kota. Maka penghitungannya menjadi seperti ini:

$$0 / 1.007.794 = 0$$

- Perpustakaan Desa/Kelurahan:

Rumus :

Jumlah pemustaka / anggota Perpustakaan Desa/Kelurahan dibagi
Jumlah Populasi Kabupaten/Kota

$$: 12500 / 1.007.794 = 0,012403$$

Maka jumlah ratio anggota untuk perpustakaan umum adalah:

$$0,034375 + 0 + 0,012403 = 0,046788$$

b. Perpustakaan Sekolah / Madrasah

- Perpustakaan SD/MI:

Rumus :

Jumlah Anggota /pemustaka Perpustakaan SD/MI dibagi dibagi
Jumlah Civitas SD/MI.

$$: 26.150 / 73.083 = 0,357812$$

- Perpustakaan SMP/MTs :

Rumus :

Jumlah Anggota/pemustaka Perpustakaan SMP/MTs dibagi jumlah
Civitas SMP/MTs.

$$: 36.802 / 34.633 = 1,062628$$

- Perpustakaan SMA/SMK/MA :

Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Anggota / pemustaka Perpustakaan SMA/K/MA}}{\text{Jumlah Civitas SMA/K/MA}} : 35.365 / 35.079 = 1,008153$$

Maka jumlah ratio anggota/pemustaka perpustakaan sekolah/madrasah adalah: $0,357812 + 1,062628 + 1,008153 = 2,428594$

c. Perpustakaan Perguruan Tinggi :

Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Anggota / pemustaka Perpustakaan Perguruan Tinggi}}{\text{Jumlah Civitas Akademika}} \text{ Maka penghitungannya menjadi seperti ini: } 350 / 1500 = 0,233333$$

d. Perpustakaan Khusus

Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Kunjungan per Hari Perpustakaan Khusus}}{\text{Jumlah Pegawai/Karyawan}} : 150 / 6964 = 0,21539$$

Setelah angka ratio per jenis perpustakaan didapatkan, selanjutnya untuk mengukur UPLM7 dengan rumus sebagai berikut:

$$50\% \left[\frac{\text{JUNJAH PEMUSTAKA PERPUSTAKAAN UMUM}}{\text{JUNJAH POPULASI PENDUDUK}} \right] + 20\% \left[\frac{\text{JUNJAH PEMUSTAKA PERPUSTAKAAN SEKOLAH}}{\text{JUNJAH CIVITAS SEKOLAH}} \right] + 20\% \left[\frac{\text{JUNJAH PEMUSTAKA PERPUSTAKAAN PERG. TINGGI}}{\text{JUNJAH CIVITAS AKADEMIKA}} \right] + 10\% \left[\frac{\text{JUNJAH PEMUSTAKA PERPUSTAKAAN KHUSUS}}{\text{JUNJAH POPULASI PENDUDUK BEKERJA}} \right] \times \text{ANGKA KOREKSI BERDASARKAN TINGKAT KEPADATAN}$$

Sehingga diperoleh hitungan sebagai berikut :

$$= (50\% (0,046788) + 20 \% (2,428594) + 20 \% (0,233333) + 10 \% (0,21539)) 1,5 = 0,836893$$

Maka didapatlah angka ratio jumlah pemustaka untuk UPLM 7 di Kabupaten Purbalingaa sebesar **0,836893**

Berdasarkan hasil perhitungan setiap unsur IPLM maka dapat disimpulkan hasil penghitungannya sebagai berikut :

1. Skor UPLM1 : **0,004164**
2. Skor UPLM2 : **0,546469**
3. Skor UPLM3 : **0,004145**
4. Skor UPLM4 : **0,483520**
5. Skor UPLM5 : **1,365229**
6. Skor UPLM6 : **0,723466**
7. Skor UPLM7 : **0,836893**

Dengan menggunakan rumus perhitungan nilai IPLM maka diperoleh rincian sebagai berikut :

$$IPLM = \sum_i \frac{UPLM_i}{AM} \times 100$$

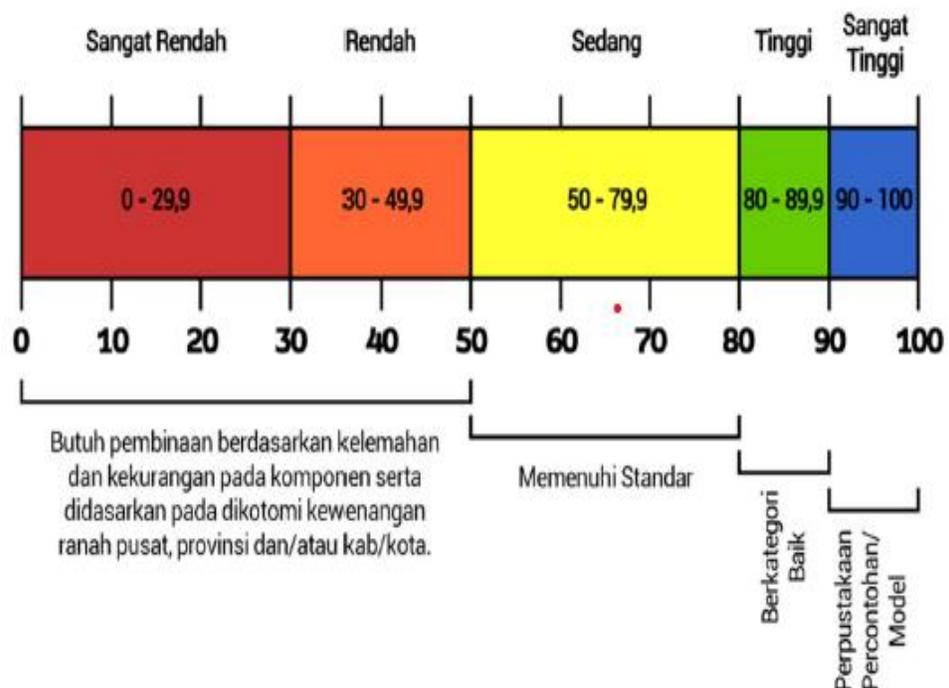
$$= \left(\frac{UPLM_1}{AM} + \frac{UPLM_2}{AM} + \frac{UPLM_3}{AM} + \frac{UPLM_4}{AM} + \frac{UPLM_5}{AM} + \frac{UPLM_6}{AM} + \frac{UPLM_7}{AM} \right) / 7 \times 100$$

Maka diperoleh hasil perhitungan IPLM sebagai berikut :

$$= (0,004164 + 0,546469 + 0,004145 + 0,483520 + 1,365229 + 0,723466 + 0,836893) / 7 \times 100 = 56,64$$

Dengan demikian berdasarkan data yang ada, maka diperoleh perhitungan nilai IPLM Kabupaten Purbalingga sebesar 56,64, skor tersebut diatas berdasarkan tabel skor nilai IPLM masuk katagori “Sedang”.

Grafik. 3.1
Skor Nilai IPLM



Sesuai dengan pedoman penghitungan IPLM Nasional maka IPLM tersebut dapat dikonversi sesuai dengan target renstra kabupaten dengan membagi dengan 4,71 sesuai dengan target Renstra Perpustnas, sehingga diperoleh nilai konversi sebesar : **56,64/4,71 = 12,02** termasuk dalam kategori

sedang. Sehingga target IKU sebesar **12** pada Tahun 2023 dapat tercapai sebesar **100,16 %**.

2....Analisis Capaian Kinerja Tujuan dengan Indikator IPLM (Indek Pembangunan Literasi Masyarakat)

Tabel. 3.18
Analisis Capaian Kinerja Tujuan dengan Indikator IPLM

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023 (%)
Indeks pembangunan literasi masyarakat	Persen	11	7,41	12	12,02	100,16

Tabel di atas menunjukkan bahwa Capaian Kinerja Tujuan dengan indikator Indek Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) pada tahun 2022 sangat rendah realisasi capainnya yakni dengan target sebesar 11, realisasi hanya sebesar 7,41, hal ini disebabkan indicator. Pada tahun 2023 target sebesar 12 sedangkan capaian sebesar 12,02 ini berarti hanya ada kelebihan capaian realisasi sebesar 0,2 atau hanya sebesar 100,16 persen.

3 Capaian Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Akhir RPJMD

Tabel. 3.19

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2022 dan Tahun 2023 Target Kinerja Akhir RPJMD

No	Tujuan/Sasaran	Indikator kinerja sasaran	Satuan	Tahun 2022		Capaian %	Tahun 2023		Capaian %	Kondisi Kinerja Akhir		Prosentase Kinerja RPJMD s.d 2023
				Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target Kinerja Akhir RPJMD	Capaian 2023	
1.	Meningkatkan pengetahuan dan literasi masyarakat	Indeks pembangunan literasi	indeks	11	7,41	67,36	12	12,02	100,16	15	100,16	80,13

Tabel di atas menggambarkan bahwa perbandingan capaian kinerja Sasaran Tahun 2022 dengan Target Kinerja akhir RPJMD dengan asumsi bahwa Indeks Pembangunan Literasi mengalami penurunan dalam tahun 2022 dibandingkan dengan target Indeks pembangunan literasi tahun 2023 dan Target Kinerja akhir RPJMD. Pada tahun 2022 Target Indeks sebesar 11, dan realisasinya sebesar 7,41, sedangkan target indeks pembangunan literasi tahun 2023 sebesar 12, realisasi sebesar 12,02 atau 100,16 persen. Target kinerja akhir RPJMD sebesar 15 dengan prosentase capaian sebesar 100,16 persen.

5 SASARAN 3 : "MENINGKATNYA AKSES MASYARAKAT TERHADAP PERPUSTAKAAN"

Perpustakaan sebagai salah satu sarana pembelajaran masyarakat sepanjang hayat perlu terus ditingkatkan pelayanannya agar masyarakat dapat terus menggunakan sehingga dapat meningkatkan literasi dan pengetahuan yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya

Sebagai sarana peningkatan literasi masyarakat, perpustakaan perlu terus didorong keberadaannya ditengah tengah masyarakat. Perpustakaan harus aktif memberikan layanan kepada masyarakat di berbagai wilayah dan komunitas masyarakat, oleh karena itu berbagai jenis perpustakaan seperti perpustakaan kabupaten, perpustakaan kecamatan, perpustakaan desa, perpustakaan sekolah Dasar/MI, perpustakaan SMP/MYs, perpustakaan SMA/SMK/MA, perpustakaan Perguruan Tinggi, Perpustakaan kusus harus mampu secara aktif memberikan layanan kepada masyarakat.

1. Capaian Kinerja Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Perpustakaan

Dalam target kinerja pada Tahun 2023 sasaran kinerja ini dapat diukur dengan Indikator sasaran berupa rasio perpustakaan aktif, table kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 3.20

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Perpustakaan

No	Sasaran	Indikator kinerja tujuan/sasaran	Satuan	Tahun 2023		Capaian %
				Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Perpustakaan	rasio perpustakaan aktif	Nilai	4,08	4,59	112.5

Dalam table tersebut dapat diketahui bahwa sasaran meningkatnya akses masyarakat terhadap perpustakaan dapat diukur dengan indicator berupa banyaknya perpustakaan yang telah memenuhi standar secara nasional dan secara aktif melaksanakan kegiatan perpustakaan serta telah mengajukan proses akreditasi perpustakaan kepada Perpustakaan Nasional.

Adapun rumus perhitungan untuk indicator rasio yang dipakai dalam sasaran ini adalah Jumlah perpustakaan yang diasumsikan yang telah memenuhi syarat untuk mengajukan Akreditasi Perpustakaan dibagi dengan Jumlah populasi penduduk dikalikan dengan 10.000. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui dari setiap 10.000 penduduk ada berapa perpustakaan

yang aktif dan yang telah memenuhi Nomor Standar Perpustakaan yang dikeluarkan pemerintah melalui PERPUSNAS RI.

Pada tahun 2023 jumlah perpustakaan yang ber NSP dapat diamsuksikan sebagai berikut :

Tabel. 3.21
Data Perpustakaan yang ber NSP/Aktif

No	Jenis Perpustakaan	Ber NSP
1	Perpustakaan Umum :	55
	a. Perpustakaan Kabupaten	1
	b. Perpustakaan Kecamatan	0
	c. Perpustakaan Desa/Kelurahan	54
2	Perpustakaan Sekolah/Madrasah :	
	a. Perpustakaan SD/MI	281
	b. Perpustakaan SMP/MTs	67
	c. Perpustakaan SMA/SMK/MA	42
3	Perpustakaan Perguruan Tinggi	3
4	Perpustakaan Kusus	15
JUMLAH		463

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah perpustakaan aktif sebanyak 463 unit perpustakaan, dengan jumlah terbanyak adalah jenis perpustakaan sekolah sebanyak 281 unit perpustakaan sekolah dasar, dan paling sedikit adalah perpustakaan umum daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga. Adapun rumus perhitungan untuk indicator rasio perpustakaan aktif dapat digambarkan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Perpustakaan Aktif} = \frac{\text{Jumlah perpustakaan aktif}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 10.000$$

$$\text{Rasio Perpustakaan Aktif} = \frac{463}{1.007.794} \times 10.000 = 4,59$$

Dari perhitungan tersebut maka untuk target sebesar 4,08 pada Tahun 2023 terealisasi sebesar dengan 4,59 dengan capaian 112,5 %. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa untuk setiap 10 ribu penduduk baru sekitar 4 atau 5 perpustakaan yang secara aktif memberikan layanan kepada masyarakat.

2. Analisis Capaian Kinerja Sasaran dengan Indikator Rasio Perpustakaan Aktif.

Perbandingan Analisis Capaian Kinerja Sasaran dengan Indikator Rasio Perpustakaan Aktif dengan realisasi tahun sebelumnya dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel. 3.22
Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran dengan Indikator Rasio Perpustakaan Aktif.

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022 (%)	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023 (%)
Rasio Perpustakaan Aktif	Rasio	3,57	4,35	121,85	4,08	4,59	112,5

Tabel di atas menunjukkan Perbandingan capaian kinerja Sasaran dengan rasio perpustakaan aktif , dimana terjadi kenaikan rasio perpustakaan aktif dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, yakni pada tahun 2022 target sebesar 3,57 dan realisasi sebesar 4,35 dengan prosentase sebesar 121,85 persen. Untuk tahun 2023 target perpustakaan aktif sebesar 4,08 dan realisasi sebesar 4,59 atau setara dengan 112,5 persen. Dapat dikatakan bahwa ada penurunan capaian rasio perpustakaan aktif tahun 2023 jika dibandingkan dengan rasio perpustakaan aktif tahun 2022.

Selanjutnya membandingkan antara target dan realisasi serta target akhir kinerja RPJMD 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

3. Capaian Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Akhir RPJMD

Tabel. 3.23

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2022 dan Tahun 2023 Target Kinerja Akhir RPJMD

No	Tujuan/Sasaran	Indikator kinerja sasaran	Satuan	Tahun 2022		Capaian %	Tahun 2023		Capaian %	Kondisi Kinerja Akhir		Prosentasi Kinerja RPJMD s 2023
				Target	Realisasi		Target	Realisasi		%	Target Kinerja Akhir RPJMD	
3	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perpustakaan	rasio perpustakaan aktif	rasio	3,57	4,35	121,84	4,08	4,59	112,5	5,61	112,5	81,81

Tabel di atas menunjukkan adanya penurunan rasio perpustakaan aktif jika dibandingkan dengan kondisi kinerja akhir yakni pada tahun 2022 target rasio perpustakaan aktif terhadap kondisi kinerja akhir sebesar 3,57 dengan realisasi sebesar 4,35 sebanding dengan 121,84 persen. Untuk tahun 2023 target rasio perpustakaan sebesar 4,08 dan capaian sebesar 4,59 atau sebanding dengan 112,5 persen. Target kinerja akhir RPJMD sebesar 5,61 capaian sebesar 112,5 atau sebanding dengan 81,81 persen.

3. Analisis keberhasilan/peningkatan atau kegagalan/penurunan kinerja yang dihadapi dalam penyelenggaraan Layanan Perpustakaan pada tahun 2023 sebagai berikut :

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

1. Tersedianya Sarana dan Prasarana Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga khususnya dengan Gedung Baru dengan dilengkapi fasilitas pendukung, BI Corner, ruang referensi, ruang multi media dan fasilitas wifi sehingga menarik masyarakat untuk berkunjung ke perpustakaan.
2. Mengadakan Sosialisasi dan Pembinaan Perpustakaan yang dilakukan pada tahun 2023 meliputi pembinaan melalui bimbingan pengelolaan perpustakaan dengan mendatangi ke desa/Kelurahan, sekolah dan unit perpustakaan lain
3. Mengadakan Lomba-lomba dan Pameran di Perpustakaan
4. Mengadakan Pelatihan dan ketrampilan Gratis melalui kegiatan perpustakaan berbasis Inklusi Sosial.
5. Menyediakan layanan Online kepada Pemustaka.
6. Mengadakan Layanan hari Sabtu (LARISA)
7. Koleksi bahan perpustakaan buku yang setiap tahun selalu bertambah jumlahnya dan juga variatif judulnya.

b. Faktor-faktor Penghambat/Kendala.

1. Semakin meluasnya ketergantungan masyarakat terhadap gadget sehingga mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung pemustaka berkunjung ke perpustakaan
2. Kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung inovasi yang masih relative terbatas.
3. Jumlah koleksi buku pada setiap jenis perpustakaan masih sangat sedikit. Padahal sesuai standar koleksi perpustakaan untuk masing masing jenis perpustakaan ada batas minimal koleksi buku yang harus tersedia.
4. Jumlah tenaga perpustakaan relative masing sangat kurang. Pada kenyataannya banyak perpustakaan yang dikelola oleh tenaga yang bukan dari tenaga yang telah memiliki basis Pendidikan perpustakaan.
5. Masih rendahnya minat baca masyarakat melalui kunjungan ke perpustakaan.
6. Masih rendahnya pembinaan perpustakaan yang sesuai dengan standar nasional perpustakaan.

- 8 Masih sedikitnya kegiatan perpustakaan yang melibatkan Masyarakat.
 - 9 Masih sedikitnya masyarakat untuk ikut serta menjadi anggota perpustakaan
- c. Adapun solisi/Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain :
1. Melakukan promosi/sosialisasi secara lebih masif, menggunakan semua sarana promosi : Website perpustakaan, Media sosial, pamflet, spanduk dll;
 2. Peningkatan kapasitas SDM petugas layanan perpustakaan dalam penguasaan teknologi informasi (IT) melalui bintek dan pembelajaran serta mengoptimalkan Tenaga Harian Lepas (THL)
 3. Optimalisasi sarana dan prasarana dalam mendukung inovasi.
 4. Mengembangkan perpustakaan berbasis digital untuk melayani Masyarakat .
 5. Melakukan penambahan jumlah koleksi perpustakaan sesuai dengan usulan pemustaka/masyarakat.
 6. Mengupayakan adanya pemanfaatan ruang kosong yang ada pada instansi (Sekolah dan pondok pesantren) pendidikan serta pemerintah desa sebagai ruang perpustakaan meskipun tidak memenuhi standard minimal yang memadai;
 7. Memberikan pembinaan dan pelatihan kepada instansi pendidikan serta pemerintah desa dalam hal penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang tujuan dan Sasaran, serta inovasi yang ada pada Bidang Perpustakaan adalah :

1. Program Pembinaan Perpustakaan
 - a. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 1. Pengembangan Perpustakaan Di Tingkat Daerah Kab./Kota
 2. Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kab./Kota
 3. Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Ddaerah Kab./Kota
 4. Pengembangan Bahan Pustaka
 5. Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
 - b. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1. Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat.
2. Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca
3. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
2. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno.
 - a. Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten.
 1. Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmedaian Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk di Lestarikan dan Didayagunakan.
4. Inovasi Bidang Perpustakaan
 - 1 PEPESES PEDES (Pembinaan Perpustakaan Sekolah/Ponpes dan Perpustakaan Desa)
 - 2 POCADI PERWIRA (Pojok baca digital)
 - 3 E BANGGA (Layanan Buku Elektronik)
 - 5 SUMBUKU CERAH (Sumbangan buku menuju Purbalingga cerdas dan ber - akhlakul karimah)
 - 6 LENTERA MAS (Literasi Perpustakaan Untuk Masyarakat)
 - 7 LARISA (Layanan Hari Sabtu)
 - 8 AJARPUSTAKA (Ayo Belajar di Perpustakaan)

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Purbalingga untuk mewujudkan tingkat capaian yang diharapkan, pada tahun anggaran 2023, didukung dengan anggaran yang bersumber dari APBD, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp **5.866.098.000,-** dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sebesar Rp. **5.689.465.000,-** berkurang sebesar Rp **176.633.000,-** Anggaran yang tersedia pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel. 3.24
Komposisi Alokasi Anggaran Pada Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp.) Setelah Perubahan	% Anggaran
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kearsipan	Kenaikan prosentase perangkat daerah yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	123.045.000,-	2.22

2	Meningkatnya Implementasi SAKIP DINARSPUS	Nilai SAKIP DINARSPUS	3.437.261.000,-	60,41
3	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perpustakaan	Rasio perpustakaan aktif	2.129.159.000,-	37,37
	JUMLAH		5.689.465.000,-	100

Pada table. 3.24 diperoleh gambaran bahwa komposisi anggaran yang telah dialokasikan pada APBD semuanya untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Melalui komposisi anggaran tersebut dapat diketahui bahwa untuk sasaran Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Kearsipan didukung anggaran yang paling kecil sedangkan untuk Meningkatkan Implementasi SAKIP DINARSPUS mendapatkan anggaran yang paling besar.

1. Capaian Kinerja Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis

Capaian kinerja anggaran berdasarkan sasaran strategis yang disajikan pada tabel 3.6 diperoleh gambaran bahwa, secara keseluruhan menunjukkan hasil yang baik.

Tabel. 3.25
Capaian Kinerja Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Purbalingga Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp.) Setelah Perubahan	Realisasi (Rp.)	%
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kearsipan	Kenaikan prosentase perangkat daerah yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	123.045.000,-	122.924.100,-	99,90
2	Meningkatnya Implementasi SAKIP DINARSPUS	Nilai SAKIP DINARSPUS	3.437.261.000,-	3.088.048.750,-	89,84
3	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perpustakaan	Rasio perpustakaan aktif	2.129.159.000,-	2.078.077.950,-	97,60
	JUMLAH		5.689.465.000,-	5.339.018.800,-	93,84

Dari tabel realisasi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi sasaran sebesar 93,84%.

2. Analisis Capaian Atas Efektifitas Penggunaan Anggaran

Tabel. 3.26
Analisis Atas Efektifitas Penggunaan Anggaran

NO	TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI ANGGARAN	
				(Rp)	CAPAIAN %
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kearsipan	Kenaikan prosentase perangkat daerah yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	108,28	122.924.100,-	99,90
2	Meningkatnya Implementasi SAKIP DINARSPUS	Nilai SAKIP	100,82	3.088.048.750,-	89,84
3	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perpustakaan	Rasio Perpustakaan Aktif	112,5	2.078.077.950,-	97,60

3. Capaian analisis atas efektifitas penggunaan Sumber Daya Anggaran

Tabel. 3.27
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kearsipan	64	64	100	123.045.000,-	42.486.000	99,90	8,38
2	Meningkatnya Implementasi SAKIP DINARSPUS	72,50	73,1	100,82	3.437.261.000,-	3.088.048.750,-	89,84	10,98
3	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perpustakaan	4,08	4,59	112,5	2.129.159.000,-	2.078.077.950,-	97,60	14,9

4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Dalam penggunaan Sumber daya yang ada, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memanfaatkannya secara optimal dengan menggunakan semua sumberdaya yang ada baik sumber daya manusia maupun sumber daya anggaran. Pada Tahun 2023. Sumber Daya Manusia yang ada pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 42 Orang Tenaga PNS dan 14 Orang, 2 PPPK dan dibantu dengan 25 Orang Tenaga Harian Lepas (THL) dan 1 orang PTT.

5. Realisasi Anggaran Berdasarkan Program/Kegiatan

Tabel. 3.28
 Capaian Kinerja Anggaran Pendanaan dan realisasi dari Program dan Kegiatan
 Tahun Anggaran 2023

No	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	SISA ANGGARAN
BIDANG PERPUSTAKAAN (2 Program, 3 Kegiatan dan 9 Sub Kegiatan)		2.129.159.000	2.078.077.950	97,60	51.081.050
A	Program Pembinaan Perpustakaan	2.104.159.000	2.103.072.950	99,95	1.086.050
1	Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.043.659.000	2.042.577.950	99,95	1.081.050
a	<i>Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	1.990.659.000	1.989.616.900	99,95	1.042.100
b	<i>Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota</i>	10.000.000	10.000.000	100	0
c	<i>Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat daerah Kabupaten/Kota</i>	15.000.000	14.989.000	99,93	11.000
d	<i>Pengembangan Bahan Pustaka</i>	20.000.000	19.972.050	99,86	27.950
e	<i>Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka</i>	8.000.000	8.000.000	100	0

2	Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60.500.000	60.495.000	99,99	5.000
a	<i>Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat</i>	25.500.000	25.500.000	100	0
b	<i>Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca</i>	10.000.000	10.000.000	100	0
c	<i>Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial</i>	25.000.000	24.995.000	99,98	5.000
B	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	25.000.000	24.973.000	99,89	27.000
1	Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	24.973.000	99,89	27.000
a	<i>Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan</i>	25.000.000	24.973.000	99,89	27.000
BIDANG KEARSIPAN (2 Program, 5 Kegiatan dan 6 Sub Kegiatan)		123.045.000	122.924.100	99,90	120.900
C	Program Pengelolaan Arsip	80.545.000	80.438.100	99,87	106.900
1	Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	53.545.000	53.449.500	99,82	95.500
a	<i>Penciptaan dan penggunaan Arsip Dinamis</i>	53.545.000	53.449.500	99,82	95.500
2	Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis daerah Kabupaten/Kota	17.000.000	16.988.600	99,93	11.400
a	<i>Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis</i>	17.000.000	16.988.600	99,93	11.400
3	Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan	10.000.000	10.000.000	100	0

	Nasional Tingkat Kabupaten/Kota				
a	<i>Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota</i>	10.000.000	10.000.000	100	0
D	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	42.500.000	42.486.000	99,96	14.000
1	Kegiatan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	17.000.000	16.988.600	99,93	11.400
a	<i>Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana</i>	8.500.000	8.494.400	99,93	5.600
b	<i>Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana</i>	8.500.000	8.494.200	99,93	5.800
2	Kegiatan Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	25.500.000	25.497.400	99,99	2.600
a	<i>Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan perangkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	25.500.000	25.497.400	99,99	2.600
F	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1 Program, 7 Kegiatan dan 17 Sub Kegiatan)	3.437.261.000	3.088.048.750	89,84	349.212.250
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.000.000	11.000.000	100	0
	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	6.000.000	6.000.000	100	0
	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	5.000.000	5.000.000	100	0

2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.501.213.000	2.175.858.195	86,99	325.354.805
	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	2.404.745.000	2.079.396.470	86,47	325.348.530
	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	64.705.000	64.698.725	99,99	6.275
	<i>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>	31.763.000	31.763.000	100	0
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.600.000	3.578.700	99,41	21.300
	<i>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	3.600.000	3.578.700	99,41	21.300
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	44.229.000	44.181.100	99,89	47.900
	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	30.729.000	30.722.200	99,98	6.800
	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	2.400.000	2.400.000	100	0
	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	7.500.000	7.475.000	99,67	25.000
	<i>Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	3.600.000	3.583.900	99,55	16.100
5	<i>Pengadaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	5.000.000	5.000.000	100	0
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	5.000.000	5.000.000	100	0
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	738.635.000	714.872.455	96,78	23.762.545

	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	540.000	540.000	100	0
	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	184.395.000	172.342.559	93,46	12.052.441
	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	553.700.000	541.989.896	97,89	11.710.104
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	133.584.000	133.558.300	99,98	25.700
	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	127.234.000	127.208.800	99,98	25.200
	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	1.350.000	1.350.000	100	0
	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	5.000.000	4.999.500	99,99	500
JUMLAH SELURUH		5.689.465.000	5.339.018.800	93,84	350.446.200

Dari tabel diatas capaian Kinerja anggaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga, dalam mencapai tujuan dan sasaran pada tahun 2023, telah melaksanakan 5 program utama dengan 15 (limabelas) kegiatan dan 32 (tigapuluh dua) sub kegiatan yang didukung anggaran belanja perubahan (DPPA) sebesar Rp. **5.689.465.000,-** Realisasi Rp. **5.339.018.800,-, 93,84%**, dengan selisih/sisa anggaran Rp. **350.446.200,-**

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Purbalingga sebagai OPD teknis yang mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perpustakaan dan Bidang Kearsipan, mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan di bidang perpustakaan dan kearsipan kepada masyarakat. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana prasarana secara efektif, efisien, berhasil dan berdaya guna serta akuntabel.

Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas dalam rangka menilai keberhasilan/ kegagalan atau tercapai atau tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Purabalingga dalam melaksanakan tugasnya secara umum dapat dikatakan berhasil dengan baik.

Kesimpulan yang dapat di sajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Purbalingga tahun 2023 ini adalah sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
Meningkatkan kualitas Pengelolaan kearsipan		Indek kearsipan	Indek	76	84,09	110,64	Sangat Tinggi
	Meningkatnya Implementasi SAKIP DINARSPUS	Nilai SAKIP		72,50	73,1	100,82	Sangat Tinggi
	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Kearsipan	Kenaikan prosentase perangkat daerah yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	Persen	64	69,03	108,28	Sangat Tinggi
Meningkatnya pengetahuan dan literasi masyarakat		Indeks Pembangunan Literasi	Rasio	12	12,02	100,16	Sedang
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perpustakaan	Rasio Perpustakaan aktif	Rasio	4,08	4,59	112,5	Sangat Tinggi
Capaian rata-rata						104,82	Sangat Tinggi

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dari kelima capaian indikator Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan tersebut memiliki capaian rata - rata sebesar **104,82%** dengan kategori “Sangat Tinggi”. Dan capaian indikator tertinggi pada capaian Rasio perpustakaan aktif dengan capaian **112,5%** dengan kategori “Sangat Tinggi”. Dan capaian terendah pada indicator Sasaran Indeks Pembangunan Literasi dengan capaian 100,16% dengan kategori “Sangat Tinggi”. Untuk capaian anggaran yang menunjang capaian sasaran terealisasi sebanyak 93,84 % dengan kategori “Sangat Tinggi. Dari semua capaian tersebut diatas, hampir semua indikator tercapai lebih dari 100 %. Hasil ini menggambarkan bahwa

capaian kinerja terhadap sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik.

B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Rata-rata tingkat pencapaian tujuan dan sasaran masuk kategori **“Sangat Tinggi”**. Adapun strategi yang perlu dikembangkan adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya penambahan jumlah sumberdaya manusia baik dalam jabatan fungsional umum maupun pustakawan dan arsiparis.
2. Perlu dilakukan pengembangan/peningkatan kapasitas sumberdaya manusia baik dalam bidang perpustakaan maupun kearsipan.
3. Perlu penambahan sarana dan prasarana untuk meningkatkan layanan kearsipan.
4. Perlu adanya penambahan dan pengembangan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) baik dalam bidang perpustakaan dan kearsipan.
5. Diperlukan adanya peningkatan dan pengembangan layanan perpustakaan yang berbasis inklusi sosial.
6. Diperlukan lebih banyak lagi untuk melakukan kerjasama dan sinergi kegiatan dengan stakeholder yang mendukung pengembangan layanan perpustakaan dan kearsipan.
7. Diperlukan inovasi yang lebih banyak lagi untuk pengembangan layanan perpustakaan dan kearsipan.
8. Segera untuk dibentuk petugas pengelola kearsipan pada masing-masing OPD.

Demikian laporan kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga tahun 2024 disusun, dan mudah-mudahan dapat memberikan gambaran yang mencukupi tentang capaian kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja dan anggaran Tahun 2023.

Purbalingga, Februari 2024

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN PURBALINGGA



SADONO, S. Sos. M. Si
Pembina Utama Muda

NIP. 19731108 199303 1 003